

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bagian ini akan menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang di dalamnya meliputi gambaran umum Kabupaten Jombang, gambaran umum Kecamatan Ngusikan, gambaran umum Desa Kromong, gambaran umum Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang yang secara terperinci akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

a. Letak Geografis

Kabupaten Jombang secara geografis membentang antara 7.20' dan 7.45' Lintang Selatan 5.20° - 5.30° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Jombang 1.159,5 Km². Berdasarkan tipologi wilayah kabupaten Jombang dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu:

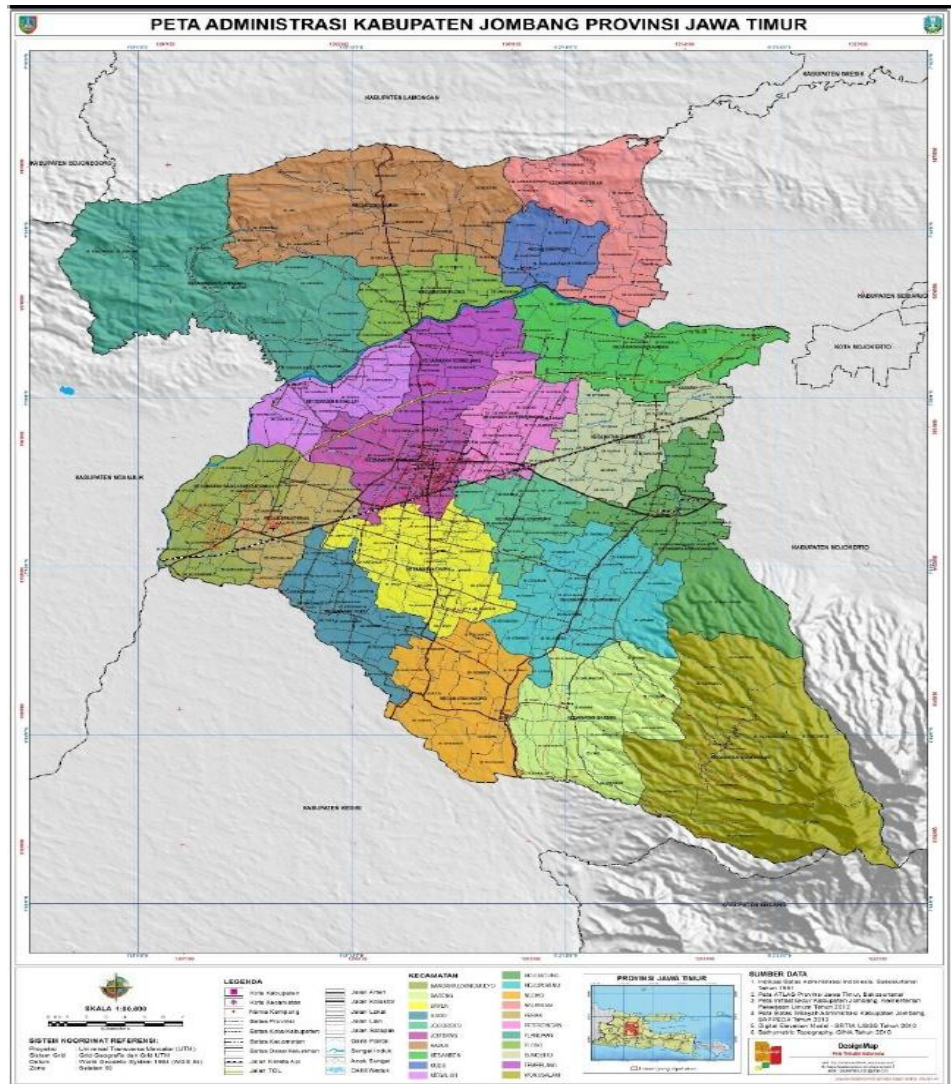
- Kawasan utara, berada di sebelah utara sungai brantas, merupakan bagian dari pegunungan kapur yang mempunyai fisiologi mendatar, berbukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Ploso, Ngusikan, Kudu, dan Kabuh.
- Kawasan tengah, berada di selatan sungai brantas yang cocok untuk di dijadikan wilayah pertanian karena saluran irigasi yang cukup baik , meliputi wilayah Kecamatan Bandar Kedung

Mulyo, Perak, Gudo, Diwek Mojoagung, Jogoroto, Sumobito, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben.

- Kaswasan selatan, berada di tenggara kabupaten Jombang, merupakan wilayah tanah pegunungan yang cocok untuk dijadikan perkebunan, meliputi Kecamatan Mojowarno, Bareng, Ngoro, dan Wonosalam.

Secara administratif Kabupten Jombang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jombang
Sumber: Jombang Dalam Angka 2016

b. Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang tahun 2015 jumlah penduduk 1.240.985 orang terdiri dari pria 617.194 dan wanita 623.791. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut jenis kelamin Kabupaten Jombang tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Jombang 2015

No.	Kecamatan	Pria	Wanita	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1.	Bandar Kedung Mulyo	21 978	22 063	44 041	100
2.	Perak	25 871	26 419	52290	98
3.	Gudo	25 339	26 015	51 354	97
4.	Diwek	52870	51977	104847	102
5.	Ngoro	34825	35285	70110	99
6.	Mojowarno	44378	43964	88342	101
7.	Bareng	24980	25552	50532	98
8.	Wonosalam	15993	15639	31632	102
9.	Mojoagung	38126	38008	76134	100
10.	Sumobito	40238	40184	80422	100
11.	Jogoroto	33604	33267	66871	101
12.	Peterongan	33070	33602	66672	98
13.	Jombang	70722	73126	143848	97
14.	Megaluh	18443	18881	37324	98
15.	Tembelang	25117	25486	50603	99
16.	Kesamben	30433	30932	61365	98
17.	Kudu	14072	14474	28546	97
18.	Ngusikan	10511	10812	21323	97
19.	Ploso	19374	19881	39255	99
20.	Kabuh	20228	20228	40456	96
21.	Plandaan	17996	17996	35992	98
Kabupaten Jombang		617194	623791	1240985	99

Sumber: Jombang Dalam Angka 2016

Dapat diketahui tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Jombang terdapat di Kecamatan Jombang. Kecamatan Jombang merupakan pusat dari Kabupaten Jombang untuk sementara ini jumlah penduduknya mencapai 143.848 jiwa pada tahun 2015. Jumlah penduduk paling kecil di Kabupaten Jombang terdapat pada Kecamatan Ngusikan dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 21323 jiwa. Adapun data penduduk menurut kecamatan di kabupaten Jombang yang berbentuk tabel sebagai berikut:

TABEL 4.2 Penduduk Perkecamatan Kabupaten Jombang 2015

No.	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Bandar Kedung Mulyo	43457	43623	43892	43917	44041
2.	Perak	51275	51551	51951	52062	52290
3.	Gudo	50757	50929	51222	51229	51354
4.	Diwek	101981	102739	103748	104175	104847
5.	Ngoro	69262	69506	69915	69932	70110
6.	Mojowarno	86360	86892	87636	87886	88342
7.	Bareng	49792	49999	50326	50371	50532
8.	Wonosalam	30884	31084	31360	31459	31632
9.	Mojoagung	73804	74415	75209	75583	76134
10.	Sumobito	77900	78560	79414	79824	80422
11.	Jogoroto	63884	64649	65578	66144	66871
12.	Peterongan	64514	65078	65801	66158	66672
13.	Jombang	138893	140178	141809	142664	143848
14.	Megaluh	36752	36911	37157	37198	37324
15.	Tembelang	49728	49969	50328	50408	50603
16.	Kesamben	60398	60667	61079	61152	61365
17.	Kudu	28360	28420	28546	28513	28546
18.	Ngusikan	21053	21131	21258	21266	21323
19.	Ploso	39021	39160	39393	39406	39509
20.	Kabuh	39284	39380	39571	39541	39602
21.	Plandaan	35522	35563	35688	35613	35618
Jumlah		1212881	1220404	1230881	1234501	1240985

Sumber: Kabupaten Jombang Dalam Angka 2016

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jombang tahun 2014 - 2015 paling tinggi terdapat di Kecamatan Jogoroto dengan nilai 1,09 dan tingkat pertumbuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Plandaan. Dapat diketahui pula laju pertumbuhan Kabupaten Jombang tahun 2010-2015 sebesar 0,29. Berikut adalah tabel yang mendukung pernyataan diatas:

**TABEL 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Perkecamatan
Kabupaten Jombang 2015**

No.	Kecamatan	Jumlah penduduk total / tahun			Laju pertumbuhan pertahun	
		2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
1.	Bandar Kedung Mulyo	43 281	43917	44041	0,17	0,28
2.	Perak	50988	52062	52290	0,25	0,44
3.	Gudo	50574	51229	51354	0,15	0,24
4.	Diwek	101204	104175	104847	0,35	0,64
5.	Ngoro	69003	69932	70110	0,16	0,25
6.	Mojowarno	85810	87886	88342	0,29	0,52
7.	Bareng	49574	50371	50532	0,19	0,32
8.	Wonosalam	30677	31459	31632	0,31	0,55
9.	Mojoagung	73179	75583	76134	0,40	0,73
10.	Sumobito	77227	79824	80422	0,41	0,75
11.	Jogoroto	63113	66144	66871	0,58	1,09
12.	Peterongan	63941	66158	66672	0,42	0,77
13.	Jombang	137581	142664	143848	0,45	0,83
14.	Megaluh	36584	37198	37324	0,20	0,34
15.	Tembelang	49477	50408	50603	0,23	0,39
16.	Kesamben	60116	61152	61365	0,21	0,35
17.	Kudu	28293	28513	28546	0,09	0,12
18.	Ngusikan	20917	21266	21323	0,17	0,27
19.	Ploso	38872	39406	39509	0,16	0,26
20.	Kabuh	39176	39541	39602	0,11	0,15
21.	Plandaan	35473	35613	35618	0,04	0,01
Kabupaten Jombang		1205114	1234501	1240985	0,29	0,52

Sumber: Kabupaten Jombang Dalam Angka 2016

2. Gambaran Umum Kecamatan Ngusikan

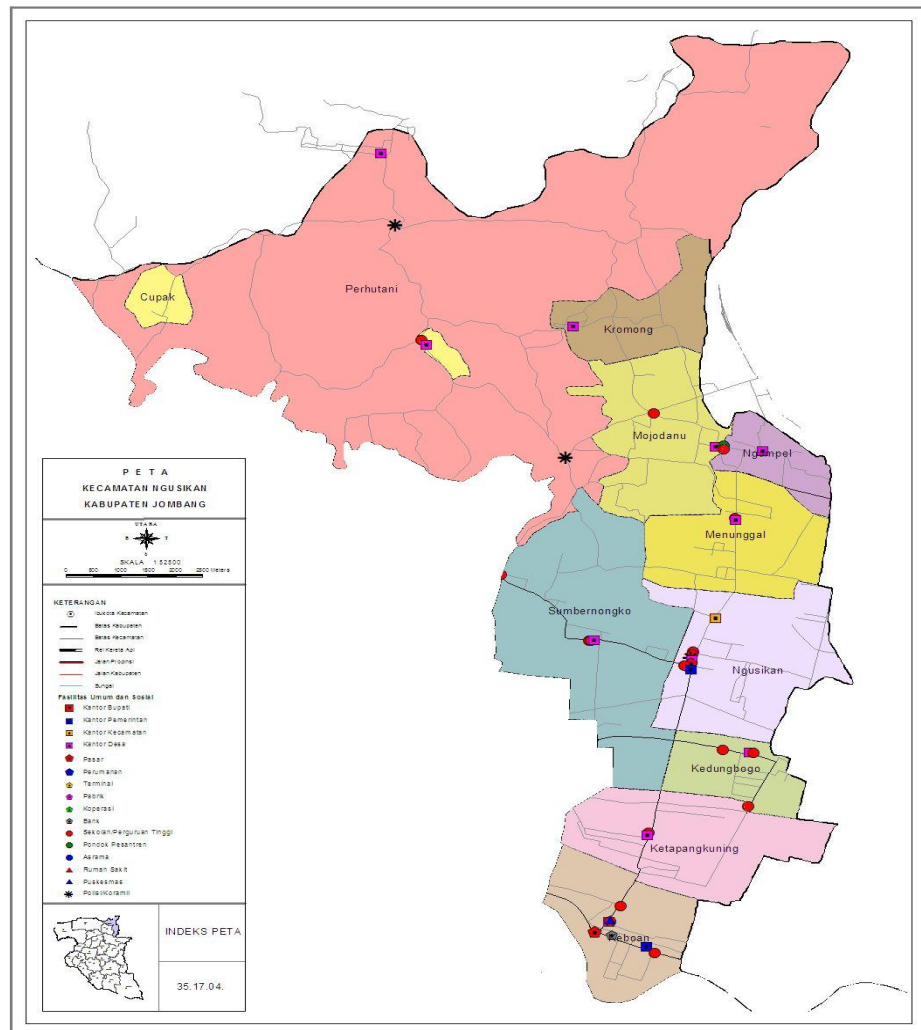
a. Letak Geografis

Kecamatan Ngusikan adalah merupakan suatu wilayah Kecamatan baru yang ada di Kabupaten Jombang dan diresmikan oleh Bapak Bupati pada tanggal 21 Nopember 2001. Jarak ibukota kecamatan ke ibukota Kabupaten 35 km engan melintasi sungai Brantas. Arah dari ibukota kabupaten adalah di sebelah Timur Laut

merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan. Kecamatan Ngusikan adalah salah satu wilayah dari Kabupaten Jombang dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Sedangkan lokasi ibukota Kecamatan Ngusikan terletak di desa Ngusikan yang letaknya di pertengahan kecamatan tersebut, dengan luas wilayah seluruhnya adalah 34.707 Km².

Adapun batas-batas Kecamatan Ngusikan adalah :

- 1) Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Kesamben
- 3) Sebelah Barat : Kecamatan Kudu, Ploso, Kabuh
- 4) Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan



Gambar 4.2 Kecamatan Ngusikan

Sumber: Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih 2013

Bentuk batas-batas wilayah Kecamatan Ngusikan lebih banyak ditandai dengan batas-batas seperti sungai Brantas, hutan, dan jalan raya.

b. Kondisi Topografi

Dapat kita simak sepiintas maka secara geografis Kecamatan Ngusikan mempunyai fisiologi mendatar atau merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan air laut. 43% wilayahnya adalah daerah hutan yaitu : 1.607 Ha meliputi desa Asemgede, Cupak, Kromong, sebagian Mojodanu, Ngampel, dan

Sumbernongko yang merupakan daerah perbukitan atau berbukit-bukit dengan kemiringan 2-15 %, daerah ini merupakan pegunungan kapur (pegunungan kendeng) sehingga cocok untuk tanaman hutan jati.

Jenis tanah di wilayah Kecamatan Ngusikan sesuai dengan lokasi adalah bervariasi dari jenis tanah padas, tanah liat hitam dan merah. Adapun tanah padas berada di sebagian wilayah utara yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan (batu pondasi). Jenis tanah liat hitam kebanyakan kita jumpai di daerah dataran rendah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian namun memiliki sifat-sifat yang labil dan pada musim kemarau terdapat keretakan-keretakan, sedangkan pada musim penghujan tanah tersebut luluh dan sampai lengket. Hal ini terdapat di Desa Keboan, Ketapangkuning, Kedungbogo, Ngusikan, sebagian Sumbernongko, Manunggal dan Ngampel. Jenis tanah liat merah dapat dijumpai di tepi-tepi Sungai Brantas dan Marmoyo, yang cocok untuk dipergunakan sebagai bahan batu merah. Adapun luas tanah menurut penggunaannya adalah sebagai berikut :

- 1). Pemukiman/Perumahan 16 % atau 603 Ha.
- 2). Sawah 40 % atau 1.505 Ha.
- 3). Tegalan 1 % atau 54 Ha.
- 4). Hutan 43 % atau 1.607 Ha.
- 5). Lainnya 0% atau 3 Ha.

c. Kondisi Hidrologi

Sebagaimana dengan wilayah Indonesia pada umumnya, yang terletak di daerah tropis, maka di Kecamatan Ngusikan kita mengenal adanya dua kali pergantian musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan yang berkisar antara bulan Nopember s/d bulan April dan musim kemarau yang berkisar antara bulan Mei s/d Oktober, dimana waktu-waktu tertentu sering mengalami perubahan, yaitu maju dan mundur dari prakiraan cuaca yang diramalkan. Curah hujan yang ada di Kecamatan Ngusikan belum dapat di kemukakan secara pasti karena belum tersedianya peralatan yang memadai untuk mencatat melakukan penelitian tentang curah hujan tersebut. Mengenai air yang berada di waduk/tandon air yang berada di Desa Asemgede, Menunggal, Ngampel untuk menampung air hujan bisa dipergunakan petani s/d bulan Juni setiap tahunnya.

d. Kondisi Demografi

Seperti halnya dengan kondisi geografis, maka keadaan demografi suatu wilayah juga merupakan suatu faktor yang amat menentukan dan penting serta perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Ngusikan adalah 23.625 jiwa, terdiri dari laki-laki 11.786 jiwa dan perempuan 11.839 jiwa serta 7.084 kepala keluarga. Komposisi penduduk menurut umur adalah sebagai berikut :

- 1) Umur 0-9 tahun : 3.159 jiwa

- 2) Umur 10-19 tahun : 3.666 jiwa
- 3) Umur 20-29 tahun : 4.129 jiwa
- 4) Umur 30-39 tahun : 3.969 jiwa
- 5) Umur 40-49 tahun : 3.675 jiwa
- 6) Umur 50-59 tahun : 2.384 jiwa
- 7) Umur 60 tahun keatas : 2.633 jiwa
- 8) Jumlah : 23.625 jiwa

Sedangkan komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan formal adalah sebagai berikut :

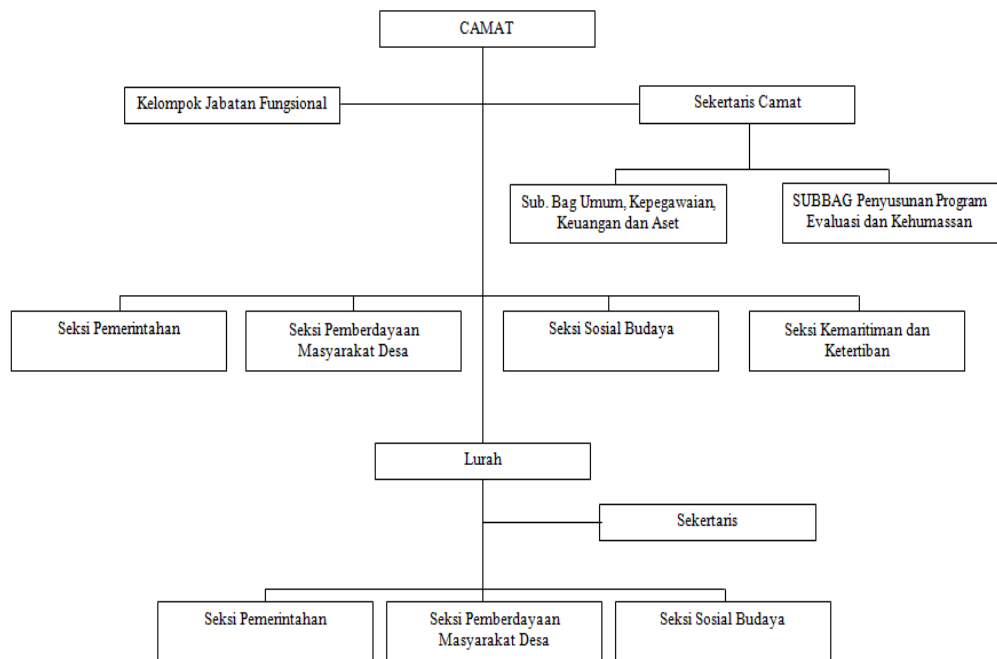
- 1) Tidak/Belum sekolah : 4.380 jiwa
- 2) Tidak tamat SD/ sederajat : 3.980 jiwa
- 3) Tamat SD : 6.275 jiwa
- 4) SLTP : 3.831 jiwa
- 5) SLTA : 2.027 jiwa
- 6) Diploma I/II : 68 jiwa
- 7) Diploma III/sarjana muda : 34 jiwa
- 8) Diploma IV/strata I : 127 jiwa
- 9) Strata II : 6 jiwa

Apabila ditinjau dari segi pekerjaan/mata pencaharian penduduk adalah sebagai berikut :

- 1) PNS / TNI/Polri : 198 orang
- 2) Pegawai Perusahaan/Swasta : 364 orang
- 3) Wiraswasta : 740 orang

- 4) Petani Penggarap : 6.462 orang
- 5) Peternak : 51 orang
- 6) Bidang Jasa/tukang, dukun bayi, dll) : 1.222 orang
- 7) Buruh tani : 3.842 orang
- 8) Pengangkutan/transportasi : 145 orang
- 9) Pedagang kecil / bakulan : 1.015 orang
- 10) Pensiunan : 67 orang
- 11) Lainnya : 859 orang

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebagai berikut:



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ngusikan
Sumber: Perbub Jombang, No. 52 Tahun 2016

3. Gambaran Umum Desa Kromong

a. Letak Geografis

Desa Kromong memiliki luas 63 Ha. Desa Kromong memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Selorejo
- 2) Sebelah Selatan : Cupak
- 3) Sebelah Timur : Mojodanu
- 4) Sebelah Barat : Asemgede

Desa Kromong memiliki empat dusun yakni:

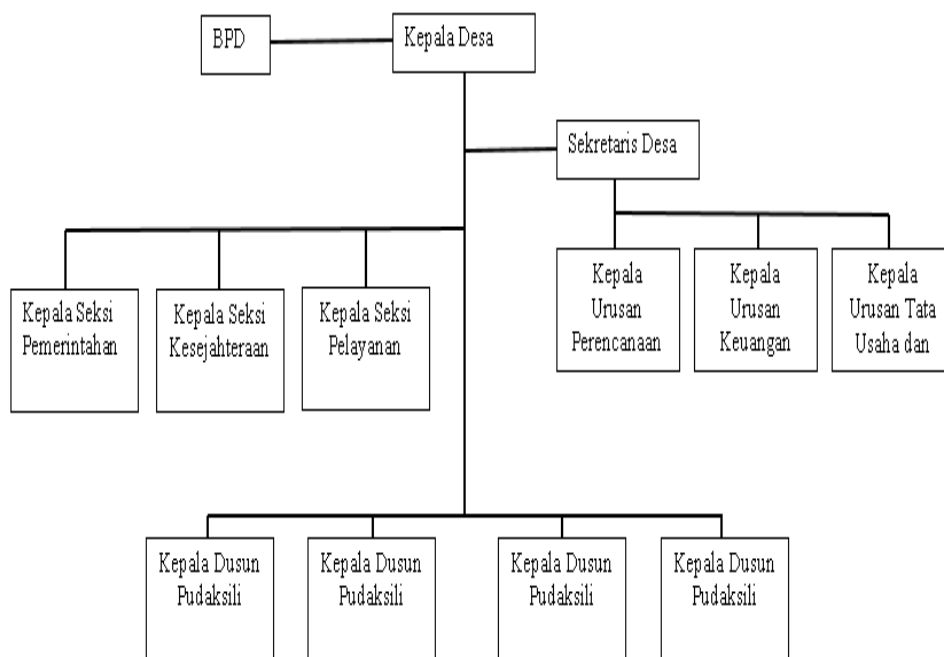
Tabel 4.4 Daftar Dusun Desa Kromong

No.	Nama Dusun	Luas
1.	Kromong	25,1 Ha
2.	Banyuasin	20,7 Ha
3.	Gondang	9 Ha
4.	Butaksili	8,2 Ha

Sumber: Data Diolah Penulis

b. Kondisi Demografi

Desa Kromong memiliki jumlah penduduk 1151 orang dengan pekerjaan sebagai buruh tani 423, petani 127, PNS 11, Swasta 305, pelajar 285. Adapun bagan susunan organisasi Desa Kromong yang mengacu pada Peraturan Desa Kromong Nomor 188/01/415.64.02/2017 tahun 2017 tentang Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kromong sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kromong

Sumber: Lampiran Peraturan Desa Kromong Nomor 188/01/415.64.02/2017 tahun 2017

4. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten

Jombang

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman

Kabupaten Jombang

Berdasarkan peraturan Bupati Jombang No. 26 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

Kedudukan:

1. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah kabupaten Jombang, yang dalam operasionalnya dibantu UPTD;

2. Dinas Perumahan Dan Permukiman dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;
3. UPTD sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dalam pelayanan masyarakat di bidang perumahan dan permukiman di wilayah kerjanya;
4. UPTD dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

b. Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang

Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang merupakan telaah dari visi dan misi kabupaten jombang yang kemudian ditetapkan menjadi visi dan misi dinas sebagaimana berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Perumahan yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan”

Pemahaman tentang visi diatas mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara Dinas Perumahan dan Permukiman dan seluruh *Stakeholders* dalam merealisasikan pembangunan kabupaten Jombang secara terpadu.

Seacara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu:

- 1) Sejahtera adalah tujuan akhir yang diharapkan dari berjalannya roda pembangunan dalam mengerahkan segala potensi sumber daya yang dimiliki.
- 2) Pembangunan adalah adanya upaya peningkatan pengembangan permukiman yang terencana sehingga secara kualitas mutu dapat ditingkatkan, sedangkan secara kuantitas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan arahan tata ruang.
- 3) Layak adalah bagian dari kenyamanan. Pembangunan melalui hal yang bisa diartikan aman, asri, sesuai dengan standar hidup manusia dan mampu mendorong keberlanjutan dari kehidupan yang lebih baik.
- 4) Produktif adalah tingkat kemanfaatan dari sebuah pembangunan. Pembangunan yang diinginkan yaitu mampu menyumbangkan hal positif dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara jangka panjang.
- 5) Berkelanjutan adalah dampak dari kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap merupakan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem yang telah ada dengan mempertimbangkan tetap terpeliharanya kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka dinas perumahan dan permukiman (2014-2018) merumuskan tiga misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan.
- 2) Twujudnya perumahan dan tata bangunan yang tertata, nyaman dan berkelanjutan.
- 3) Mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

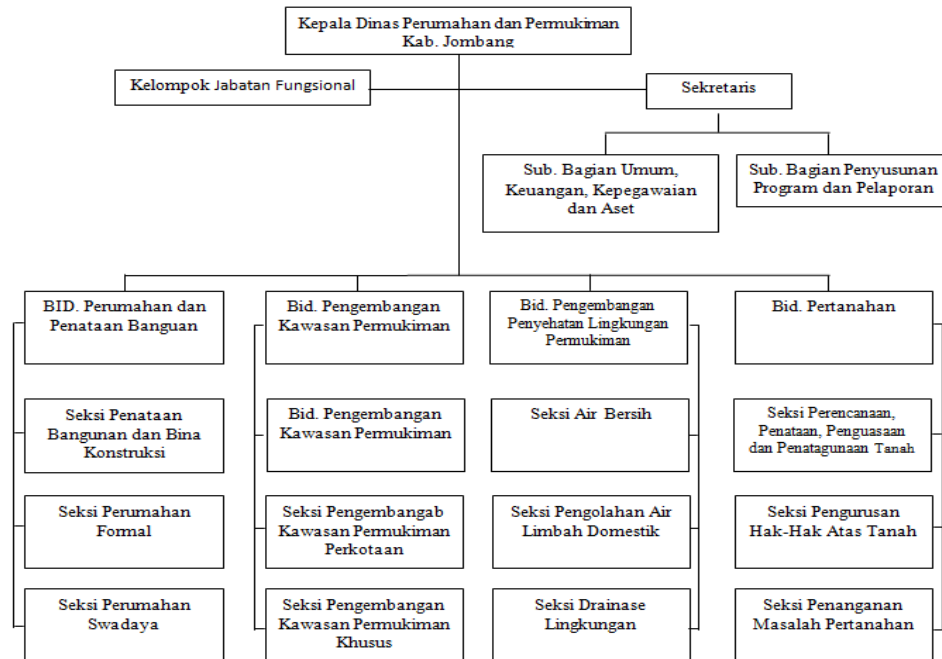
c. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang

Susunan organisasi dinas perumahan dan permukiman kabupaten jombang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum Keuangan, Kepegawaian, dan Aset;
 - b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- 3) Bidang Perumahan dan Penataan Bangunan, Membawahi:
 - a) Seksi penataan Bangunan dan Bina Konstruksi;
 - b) Seksi Perumahan Formal.

- c) Seksi Perumahan Swadaya.
- 4) Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Membawahi:
 - a) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - c) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Khusus.
- 5) Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, Membawahi:
 - a) Seksi Air bersih;
 - b) Seksi Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c) Seksi Drainase Lingkungan.
- 6) Bidang Pertanahan, Membawahi:
 - a) Seksi Perencanaan, Penataan, Pengusahaan, dan Penatagunaan Tanah;
 - b) Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah;
 - c) Seksi Penanganan Masalah Pertanahan.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Yang terdiri Dari:
 - a) UPTD Permukiman Jombang;
 - b) UPTD Permukiman Ploso;
 - c) UPTD Permukiman Mojoagung.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan susunan organisasi dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang sebagai berikut:



Gambar 4.5 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Jombang

Sumber: Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Jombang 2016

5. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang

a. Tugas Pokok Dan Fungsi

Pada Peraturan Bupati Jombang 18 Tahun 2011 tentang Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang memiliki tugas pokok membantu Bupati untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan, penanggulangan bencana, kedaruratan dan logistik

serta rehabilitasi akibat bencana, dalam melaksanakan tugas pokok, BPBD memiliki fungsi untuk:

1. Penyusunan, perumusan rencana program dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pelaksanaan urusan sekretariat;

b. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang

Visi merupakan gambaran, cita-cita, kondisi ideal yang diharapkan, serta pencerminan komitmen masa depan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dipilih dan diwujudkan pada periode 5 tahunan. Berdasarkan pengertian visi tersebut, BPBD Kabupaten Jombang menetapkan visi sebagai berikut :

**“KETANGGUHAN DAERAH DALAM MENGHADAPI
BENCANA”**

Maksud dari visi ini adalah: dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 maka BPBD harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana di Kabupaten Jombang. selain itu BPBD akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran

masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan. Rumusan visi ini pada dasarnya memiliki tujuan :

- 1) Mencerminkan apa yang ingin dan akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Jombang;
- 2) Memberikan arah dan fokus strategi bagi BPBD Kabupaten Jombang;
- 3) Menumbuhkan komitmen bagi seluruh jajaran aparatur dalam lingkungan BPBD Kabupaten Jombang;
- 4) Agar BPBD Kabupaten Jombang memiliki orientasi masa depan;
- 5) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi BPBD Kabupaten Jombang;
- 6) Menjamin kesinambungan kepemimpinan BPBD Kabupaten Jombang.

Misi merupakan maksud khas atau unik dan mendasar yang membedakan sebuah instansi dengan instansi lain serta mengidentifikasi ruang lingkup program atau kegiatan institusi, tindakan untuk mewujudkan visi instansi serta artikulasi kemampuan instansi untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya. Misi BPBD Kabupaten Jombang akan menjadi pondasi penyusunan rencana strategis serta perwujudan komitmen untuk pencapaian visi. Dengan demikian, berdasarkan visi, tupoksi serta kewenangan BPBD, maka

ditetapkan misi sebagai arah, tujuan dan sasaran yang dicita-citakan selama lima tahun mendatang, sebagai berikut :

Tabel 4.5 Misi BPBD

No.	Misi	Maksud
1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPBD untuk Mewujudkan penanggulangan bencana yang handal	Pengembangan kapasitas meliputi tiga bidang yaitu pengembangan SDM Aparatur, penataan kelembagaan dan penataan sistem melalui inovasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat
2.	Melindungi masyarakat Kabupaten Jombang dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko	Pengurangan risiko bencana (<i>disaster risk reduction</i>) merupakan suatu pendekatan praktis sistematis untuk mengidentifikasi atau mengenali, mengkaji dan mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Tujuan pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerentanankerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun yang lain yang menimbulkan kerentanan
3.	Melindungi masyarakat Kabupaten Jombang pada saat tanggap darurat	Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak bencana yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana prasarana publik.
4.	Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana	Pada saat pasca bencana perlu dilakukan pemulihan masyarakat, pemulihan infrastruktur, pelestarian lingkungan; pembangunan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Dengan demikian BPBD perlu melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas SKPD guna mewujudkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang efektif dan efisien.

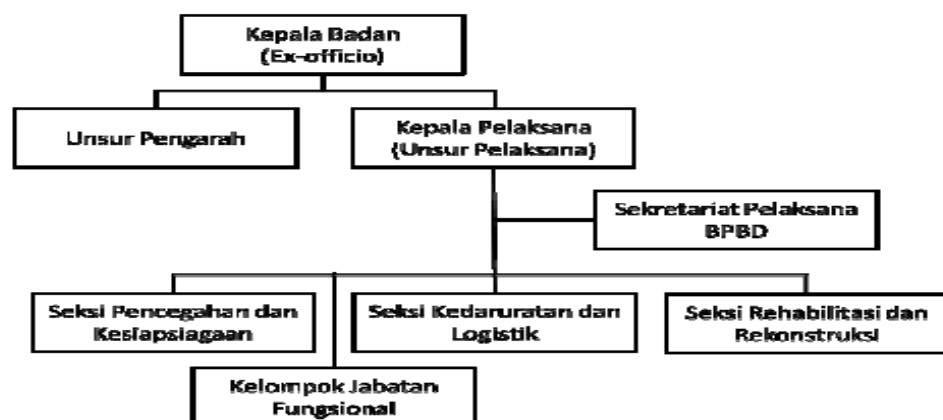
Sumber: Resntra BPBD 2014-1018

c. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari Kepala Badan, Unsur Pengarah dan unsur pelaksana yaitu :

- 1) Kepala Pelaksana BPBD
- 2) Sekretaris
- 3) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 4) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
- 5) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 6) Kelompok Jabatan fungsional

Bagan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.5 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang

Sumber: Renstra BPBD Kab. Jombang 2014-2018

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Sinergi Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Mengatasi Krisis Air Di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

a. Sikap Saling Percaya Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Mengatasi Krisis Air Di Kecamatan Ngusikan

Sikap saling percaya merupakan pondasi utama untuk mewujudkan sinergi antara dua aktor atau lebih. Aktor dalam mengatasi krisis air bersih di Kecamatan Ngusikan adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang. Sikap saling percaya ini diwujudkan oleh masing-masing aktor, pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Syaiful Anwar selaku kepala bidang air bersih pada Dinas Perumahan dan Permukiman:

“Sikap saling percaya kami bangun dengan program untuk mengatasi krisis air yang ada di Kecamatan Ngusikan, perencanaan yang didiskusikan dan dilaksanakan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dengan program-program, rapat rutin triwulan. Dalam hal ini kami membuat program pada tahun 2013 yaitu pembuatan saluran perpipaan” (wawancara pada tanggal 19 Juni 2017, pukul 08.40 WIB di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang).

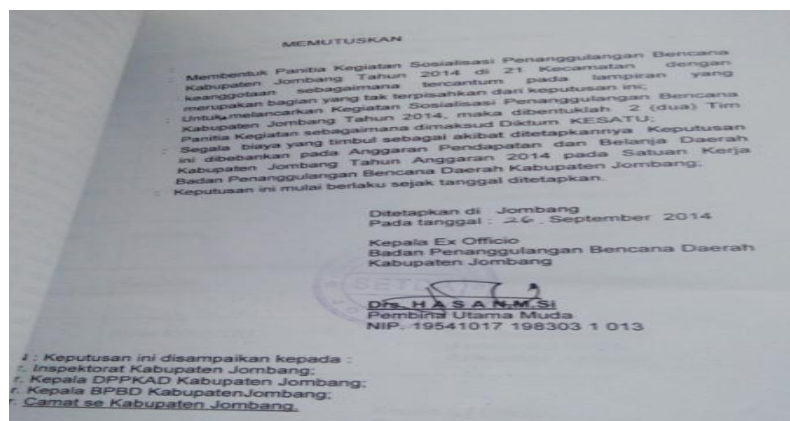
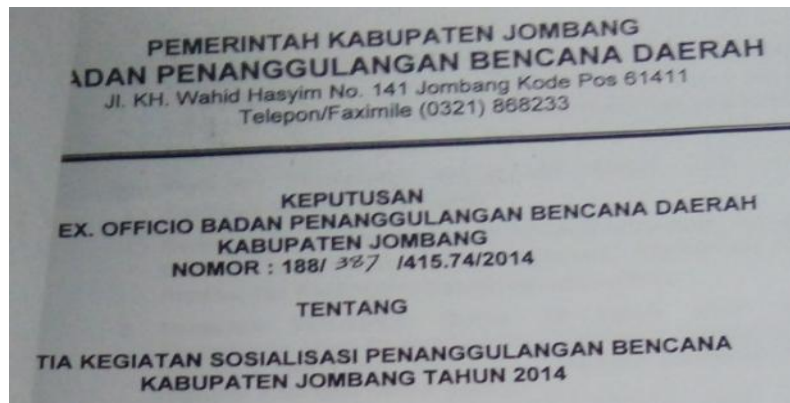


Gambar 4.6 Saluran Perpipaian

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2017)

Dalam pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa sikap saling percaya Dinas Perumahan dan Permukiman dengan cara membangun program yang dimana program tersebut akan meningkatkan sikap saling percaya karena telah dibuktikan dan dikerjakan. Program yang dibuat oleh Dinas Perumahan dan Permukiman adalah dengan membuat saluran perpipaian. Hal senada tentang sikap saling percaya antara aktor yang mengatasi krisis air di Kecamatan Ngusikan juga diutarakan oleh Bapak Purwanto selaku Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

"Sikap saling percaya antar dinas, badan, perusahaan daerah pemerintah dan masyarakat terkait krisis air di Kecamatan Ngusikan ini dibangun dengan cara membuat program-program, kerjasama dan rapat rutin antar dinas, kantor, perusahaan daerah pemerintah serta masyarakat yang diwakilkan oleh Kepala Desa. Program yang telah kami laksanakan yaitu tentunya pengiriman air kepada desa kromong, lalu kami juga membuat saluran perpipaian dengan Dinas Perumahan dan Permukiman" (wawancara pada tanggal 25 Mei 2017, pukul 08.30 WIB di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang).



Gambar 4.7 Surat Edaran Sosialisasi BPBD

Sumber: Dokumen Kantor Kecamatan Ngusikan



Gambar 4.8 Sosialisasi BPBD di Kantor Kecamatan Ngusikan

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Ngusikan

Dapat diuraikan bahwa sikap saling percaya antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Perumahan dan Permukiman dan masyarakat akan terwujud jika ada program yang dikerjakan dan selesai telah berjalan. Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang, hal ini diperkuat oleh Bapak Slamet direktur utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang sebagai berikut:

“Sikap saling percaya ini tentunya ada mas. Kami membangun sikap saling percaya ini dengan cara berkontribusi menyediakan air yang akan dikirim oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan selanjutnya disalurkan ke masyarakat krisis air. Tetapi perlu digaris bawahi mas kami sebagai perusahaan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus membeli air yang kami sediakan, ya mohon maaf mas ini untuk profesionalitas Perusahaan Daerah Kab. Jombang” (wawancara pada tanggal 14 Juni 2017, pukul 08.00 WIB di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat terjadi krisis air bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum. PDAM Kabupaten Jombang berkontribusi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang untuk menyediakan air saat diminta bantuannya dari sinilah sikap saling percaya didapatkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal sikap saling percaya Bapak Anjik Eko Prasetyo selaku Camat Ngusikan juga turut membentuk sikap saling percaya kepada aktor yang mengatasi krisis air:

“kami percaya bahwa pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan mengatasi krisis air di Kecamatan Ngusikan. Kepercayaan ini kami dapatkan dari sikap sigap Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam merespon pengaduan kami ketika terjadi krisis air di Kecamatan Ngusikan. Lalu ketika memasuki kemarau Badan Penanggulangan Bencana Daerah selalu memberikan sosialisasi tentang cara mengatasi krisis air ini. Sikap saling percaya antara Kecamatan dan Desa berdampak juga kami bentuk mas, hal ini untuk menjaga hubungan kami berjalan dengan baik, meskipun tidak ada bencana kami tetap memberikan informasi akan program yang berjalan dalam mengatasi krisis air tersebut” (wawancara pada tanggal 21 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor Kecamatan Ngusikan).



Gambar 4.9 Pengiriman Air Oleh BPBD

Sumber: Dokumentasi BPBD Kab. Jombang 2015

Dalam pembicaraan tersebut dapat diketahui bahwa sikap saling percaya antara Kecamatan dengan Badan Penanggulangan Bencana ini terjadi ketika terdapat responsifitas BPBD dalam menanggapi krisis yang terjadi dan adanya sosialisasi bencana yang gencar dilakukan baik sebelum terjadi bencana maupun sesudah bencana. Pemerintah kecamatan juga membentuk sikap saling percaya ini dengan Desa berdampak yaitu Desa Kromong yang tepatnya di Dusun Kromong dan

Banyuasin. Pernyataan lebih lanjut diucapkan oleh Bapak Anam selaku

Kepala Desa Kromong yang mengatakan:

“sikap saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat ini kami peroleh dari sigapnya pak camat yang memberikan informasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan BPBD merespon secara cepat keadaan kami yang sedang kesulitan krisis air. Lalu kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat saluran perpipaan dan memberikan tandon air kepada kami untuk mengatasi krisis air yang terjadi disini. Kami saat terjadi krisis air di kirimi oleh BPBD” (wawancara pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 09.30 WIB di Kantor Kepala Desa Kromong).



Gambar 4.10 Tandon Air Di Dusun Kromong

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2017)

Dari pernyataan kepala Desa Kromong diatas menunjukkan bahwa sikap saling percaya masyarakat dengan instansi pemerintah diciptakan karena respon yang cepat oleh kepala kecamatan yang memberikan pemberitahuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan adanya krisis air yang terjadi di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin, Desa Kromong. Adanya sikap saling percaya ini di landasi oleh

komunikasi yang efektif antara masyarakat melalui kepala desa kepada instansi pemerintah daerah.



Gambar 4.11 Tandon Air Di Dusun Banyuasin

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2017)

Pernyataan kepercayaan dijelaskan pula oleh bapak Sukadi selaku Kepala Dusun Banyuasin sebagai berikut:

“Ya mas, dalam kepercayaan saya selaku kepala Dusun Banyuasin kepada pemerintah daerah muncul karena ada strategi dan kemauan pemerintah daerah untuk mengatasi krisis air disini. Pemerintah memberikan kami bantuan air ketika kami meminta bantuan, memberikan kami tandon air dan membuatkan saluran perpipaan” (wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 09.30 WIB di rumah Bapak Sukadi).

Pendapat ini diperkuat oleh Ibu Marni yang mengatakan bahwa:

“saya mendapatkan bantuan air bersih mas yang dikirim dari jombang, lalu saya dengar itu kami juga dibuatkan saluran perpipaan dari Kromong ke sini (Banyuasin), terus Dusun Juga diberi tandon air yang ditaruh di depan pak kasun”(wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di rumah Ibu Marni).

Bapak Marjono juga memberikan pemaparan tentang kepercayaan kepada Pemerintah daerah sebagai berikut:

“saya ya percaya mas kalo pemerintah menangani krisis air disini saya diberi bantuan air dari jombang, apalagi dengan pak kasun dia orangnya ulet buktinya sekarang meskipun kemarau tiba saya masih dapat jatah walaupun dikit berkat dari sumur bor yang dibuat pak kasun” (wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 10.30 WIB di rumah Bapak Marjono).

Dalam wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat percaya pada pemerintah daerah dengan cara memberikan tandon air, bantuan air, dan saluran perpipaan kepada Dusun Banyuasin, tidak hanya itu masyarakat juga mengapresiasi kinerja dari Kepala Dusun yang membuat sumur bor swadaya.

Kepercayaan yang diciptakan oleh pemerintah daerah melalui strategi mengatasi krisis air di Dusun Kromong berbeda dengan Dusun Banyuasin. Perbedaan tersebut diketahui dari wawancara dengan Kepala Dusun Kromong yaitu Bapak Wahoni sebagai berikut:

“jadi mas, kepercayaan dalam terhadap pemerintah daerah itu pasti ada. Saya selaku kepala dusun percaya karena pemerintah daerah membatu kami mengatasi krisis air berupa sumur bor dan tandon berkapasitas 2.200 liter” (wawancara pada tanggal 1 november 2017 pukul 09.00 WIB di rumah Bapak Wahoni).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh warga Dusun Kromong, Bapak Bambang yang menyatakan:

“iya mas betul kami dibuatkan sumur bor dan diberi tandon air untuk mengatasi krisis air yang terjadi disini, kami juga diberi kiriman air dari jombang juga” (wawancara pada tanggal 1 november 2017 pukul 10.00 WIB di rumah Bapak Bambang).

Pernyataan kepercayaan kepada pemerintah daerah juga diungkapkan oleh warga Dusun Kromong Ibu Misnah sebagai berikut:

“saya percaya mas kepada pemerintah daerah kalau bisa menangani krisis air dusun Kromong. Dulu saat masih krisis kami dikirim air dari jombang. Saat ini saya sudah tidak memikirkan air soalnya sudah dibuatkan sumur bor oleh pemerintah itu juga ada tandon di depan musola juga diberi saat ini keadaan disini sudah tidak krisis air mas, yang saya dengar sekarang krisis masih terjadi di Banyuasin” (Wawancara pada tanggal 1 november 2017 Pukul 10.30 WIB di rumah Ibu Misnah).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi krisis air yang ada di kedua dusun strategi yang dilakukan berbeda. Diketahui perbedaan strategi untuk mengatasi krisis air tersebut adalah adanya sumur bor di Dusun Kromong dan tidak adanya sumur bor di Dusun Banyuasin. Krisis air yang terjadi di Dusun Kromong sudah teratasi dengan strategi pembuatan sumur bor dan pemberian tandon air, sedangkan krisis air yang terjadi di Dusun Banyuasin hingga saat ini masih terjadi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa sikap saling percaya antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengatasi krisis air di kecamatan Ngusikan tepatnya pada Desa Kromong, Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin telah dilakukan dengan cara pembuatan sumur bor, saluran perpipaan oleh dinas perumahan dan permukiman dan pengiriman air, pemberian tandon air berkapasitas 2200 liter oleh BPBD. Masyarakat juga terbantu oleh kineja dari Kepala Dusun banyuasin yang membuat sumur bor swadaya

dengan dana dari meminta sumbangan kepada pondok pesantren. Adanya sumur bor swadaya ini telah membantu penyediaan air di Dusun Banyuasin meskipun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air pada saat kemarau tiba. Adanya strategi untuk mengatasi krisis air membutuhkan komunikasi untuk mengetahui ketepatan strategi dan mempererat hubungan dan rasa saling percaya.

b. Komunikasi Yang Efektif Antara Masyarakat dengan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi krisis Air di Kecamatan Ngusikan

Komunikasi dalam hal ini merupakan cara untuk menjalin hubungan yang baik oleh instansi pemerintah daerah. Komunikasi yang dilakukan dengan cara menjalin percakapan melalui telepon dan surat menyurat yang dilakukan instansi, badan, kantor serta perusahaan pemerintah daerah yang bersangkutan mengenai permasalahan krisis air. Seperti yang Dijelaskan oleh Bapak Syaiful Anwar tentang komunikasi yang dibangun oleh dinas dengan instansi lainnya, pernyataan tersebut sebagai berikut:

“Kami membangun komunikasi dengan instansi lain pemerintah yang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang saudara teliti yaitu mengenai krisis air yang terdapat di kecamatan Ngusikan. Jadi, dalam perencanaan kami berkerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami selama berkomunikasi dengan telepon, surat menyurat, dan rapat triwulan untuk evaluasi program yang akan di kerjakan maupun telah dikerjakan” (wawancara pada tanggal 19 Juni 2017, pukul 08.40 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang).



Gambar 4.12 Kepala BPBD Kabupaten Jombang

Sumber: Dokumentasi BPBD

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dibangun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jombang mengenai perencanaan yang akan dilakukan untuk mengatasi krisis air di Kecamatan Ngusikan yang tepatnya di Dusun Kromong dan Banyuasin, Desa Kromong. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Purwanto sebagai berikut:

“Komunikasi kami bangun baik dengan Dinas Perumahan dan Permukiman serta kantor kecamatan dan masyarakat untuk membangun suatu kesinergian yang dimana dalam kasus seperti krisis air yang terjadi di Kecamatan Ngusikan tepatnya pada Desa Kromong, Dusun Kromong dan Banyuasin. Kalau masalah krisis prosedurnya dari desa ke kecamatan lalu ke sini (BPBD) mas. Selama ini komunikasi kami bangun dengan cara telepon dan surat menyurat yang berisikan sosialisasi penanganan bencana sampai pengadaan alat untuk membantu mengatasi permasalahan krisis air yang terjadi, tidak lupa kami juga berkomunikasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang dengan memberikan surat dan kerjasama bila terjadi kekurangan air saat krisis air terjadi” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2017, pukul 08.30 WIB di Kantor BPBD Kabupaten Jombang).



Gambar 4.13 Undangan Rapat Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Dokumen Kantor Kecamatan Ngusikan

Komunikasi yang dibangun oleh BPBD merupakan aspek penting karena BPBD merupakan eksekutor pemerintah daerah kabupaten Jombang dengan masyarakat terdampak krisis yaitu di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin Kecamatan Ngusikan dan penghubung antara masyarakat dengan Dinas Perumahan dan Permukiman yang menaungi permasalahan krisis air yang ada di Kecamatan Ngusikan. Pernyataan tersebut senada dengan Camat Ngusikan Anjik Eko Prasetyo yang mengatakan:

“Hubungan kami dengan instansi pemerintah daerah sangat erat, terutama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena yang mengirimkan air, pengadaan alat, serta koordinasi dan sosialisasi penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD, komunikasi kami menggunakan telepon dan surat menyurat. Tidak lupa dengan Dinas Perumahan dan Permukiman karena dinas tersebut yang membangun saluran perpipaan dari Dusun Kromong ke Banyuasin. Lalu komunikasi dengan kepala Desa Kromong ya jelas sangat erat mas, masak sama kepala desa sendiri tidak berkomunikasi. Ya, jadi begini kalau mengenai permasalahan sinergi mengatasi krisis air dalam hal komunikasi saya selaku kepala Kecamatan Ngusikan merupakan jembatan untuk masyarakat desa yang diwakili oleh kades selalu merespon dengan cepat, saya telponkan itu ke BPBD saat krisis

terjadi” (wawancara pada tanggal 21 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor Kecamatan Ngusikan).



Gambar 4.14 Undangan BPBD Kepada Camat

Sumber: Dokumen Kantor Kecamatan Ngusikan

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Kecamatan Ngusikan juga membangun komunikasi dan menjembatani antara masyarakat yang diwakilkan oleh Kepala Desa Kromong dengan instansi pemerintah daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengatasi krisis air yang terjadi. Komunikasi yang dibangun oleh Kepala Kecamatan Ngusikan yaitu dengan cara bertelepon dan surat menyurat baik itu dengan Kepala Desa maupun dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang. Lebih lanjut komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat desa dijelaskan oleh Bapak Anam Selaku Kepala Desa Kromong:

“Komunikasi desa dengan Instansi Pemerintah Daerah sangat erat mas apa lagi saya selaku kepala desa yang mewakili masyarakat desa tentunya sangat erat apa lagi dengan kepala kecamatan yang selama ini kami selalu dibantu untuk berkomunikasi dengan pusat untuk permasalahan krisis air di Desa Kromong ini mas. Selama ini kami menjalin hubungan

berkomunikasi dengan cara telepon dan surat menyurat dinas” (wawancara pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 09.30 WIB di Kantor Kepala Desa Kromong).



Gambar 4.15 Permintaan Air

Sumber: Dokumen Kantor Kecamatan Ngusikan

Dapat disimpulkan dari wawancara tentang komunikasi yang dibangun untuk mengatasi krisis air di Kecamatan Ngusikan tepatnya di Desa Kromong, Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin terdapat komunikasi yang dibangun oleh instansi pemerintah daerah dengan masyarakat antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, Kecamatan Ngusikan, dan Desa Kromong dengan cara telepon, surat menyurat dan sosialisasi saat akan memasuki musim kemarau dan saat terjadinya kemarau.

Pernyataan komunikasi masyarakat juga diberikan oleh Bapak

Wahoni sebagai berikut:

“Komunikasi selama ini dengan BPBD mas soalnya yang mengadakan sosialisasi, kalau dengan Dinas Perumahan dan Permukiman selama ini tidak pernah melakukan sosialisasi. Kalau masalah permintaan air itu saya hubungi pak lurah bahwa kami kurang air” (wawancara pada tanggal 1 november 2017 pukul 09.00 WIB di rumah Bapak Wahoni).

Dalam komunikasi yang dibangun pemerintah daerah dengan masyarakat Bapak Bambang mengungkapkan:

“ya kalau masalah komunikasi ya ndak pernah mas, saya ini bukan aparat desa, mungkin pak kasun bisa menjelaskan komunikasinya. Ya selama ini saya bicara sama pak kasun kapan pak kiriman air datang suda seperti itu saja mas” (wawancara pada tanggal 1 november 2017 pukul 10.00 WIB di rumah Bapak Bambang).

Wawancara tersebut diperkuat lagi dengang Ibu Misnah yang mengatakan:

“ya ndak tau mas caranya gimana kok bisa dapat air. Kalau selama ini saya tidak pernah ikut acara sosialisasi, *wong* tidak pernah dapat undangan” (Wawancara pada tanggal 1 november 2017 Pukul 10.30 WIB di rumah Ibu Misnah).

Dari wawancara pada Dusun Kromong tentang komunikasi yang efektif diketahui bahwa komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat tidak berjalan efektif hal ini dikarenakan komunikasi yang dibangun hanya mencapai pada tingkat perangkat desa. Pernyataan komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat juga diberikan oleh Bapak Sukadi selaku Kepala Dusun Banyuasin sebagai berikut:

“ya selama ini saya berkomunikasi dengan Pak Anam, dengan langsung tatap muka mas untuk meminta bantuan air ke pemerintah jombang. Kalau dengan BPBD ya saat bantuan air

datang lalu saat survei lokasi juga. Kalau dengan Dinas Perumahan dan Permukiman saya tidak pernah komunikasi” (wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 09.30 WIB di rumah Bapak Sukadi).

Bapak Marjono masyarakat Dusun Banyuasin mengungkapkan bahwa komunikasi yang dilakukannya “saya tidak pernah komunikasi mas, yang biasanya menemui tamu ya Pak Sukadi” (wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 10.30 WIB di rumah Bapak Marjono). Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Marni selaku warga Dusun Banyuasin yang mengatakan “saya tidak pernah berbicara dengan pemerintah jombang mas, yang saya tau Pak Sukadi yang menemui saat kesini” (wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di rumah Ibu Marni). Dari wawancara tersebut disimpulkan bahwa komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat Dusun Banyuasin tidak berjalan Efektif karena komunikasi yang dibangun masih belum sampai pada tingkat masyarakat paling bawah.

Berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan di lapangan komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat menjadi faktor kritis, kurang mendukung adanya saran-saran yang belum ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah sehingga hal ini dapat merusak sikap saling percaya yang telah terjalin oleh pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat memberikan kepercayaan penuh pada kepala dusun masing-masing untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

c. Feedback atau Umpan Balik Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Mengatasi Krisis Air Di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

Feedback atau umpan balik merupakan suatu tanggapan yang bersifat positif maupun negatif. Umpan balik ini tentunya akan memberikan masukan yang sangat besar untuk aktor-aktor yang terdapat dalam mengatasi krisis air di Desa Kromong, Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Berikut adalah data umpan balik antar instansi pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengatasi krisis air yang ada di Kecamatan Ngusikan oleh Bapak Syaiful Anwar selaku Kepala Bagian Air Bersih Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Jombang sebagai berikut:

“Umpan balik dalam kegiatan mengatasi krisis air ini berdampak positif, terkait program yang kami kerjakan dengan BPBD dalam mengatasi krisis air yang terjadi, feedback ini kami terima dari masyarakat terdampak yang akan kami jadikan evaluasi untuk perencanaan yang selanjutnya, apakah program ini akan dilanjutkan atau tidak. Seperti halnya dalam evaluasi saluran perpipaan pada tahun 2013, warga desa melalui kepala desa memberikan masukan bahwa hal ini memang trobosan besar untuk mengatasi krisis air tetapi hanya digunakan saat terjadi krisis air saja” (wawancara pada tanggal 19 Juni 2017, pukul 08.40 WIB).



Gambar 4.16 Sumur Bor dan Saluran Pip

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2017)

Dari pernyataan Dinas Perumahan dan Permukiman serta BPBD Kabupaten Jombang dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua aktor pemerintah tersebut dalam membuat perencanaan saling memberikan umpan balik dan warga desa juga memberikan masukan untuk evaluasi penerapan rencana saluran perpipaan yang di bangun Di Desa Kromong tersebut. Bapak Purwanto selaku Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang juga memberikan informasi terkait *feedback* dalam mengatasi krisis air di Desa Kromong, Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang sebagai berikut:

“Kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah selalu mendapat *feedback* secara langsung dari instansi pemerintah daerah berupa apresiasi tanggap bencana yang sigap dan dari masyarakat yang telah menanti kedatangan kami untuk mengambil bantuan yang diberikan pemerintah daerah melalui kami, tidak lupa juga kami harus bekerja secara maksimal karena kami merupakan jembatan yang menghubungkan dua aktor besar tersebut. Pernah kami diberi masukan oleh kepala Desa Kromong bahwa tandon air, sumur bor dan hippam mungkin akan efektif dan efisien untuk mengatasi krisis air yang terjadi di daerahnya”

(wawancara pada tanggal 25 Mei 2017, pukul 08.30 WIB di Kantor BPBD kabupaten Jombang).

Feedback atau umpan balik juga diberikan oleh Camat Ngusikan Bapak

Anjik Eko Prasetyo:

“Saya selaku kepala kecamatan mengapresiasi bahwasannya kinerja pemerintah daerah dalam mengatasi krisis air di wilayah saya ini sangat cekatan terutama oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang yang siap senantiasa mengirim air dua kali satu minggu dengan jumlah 25000 liter saat terjadi krisis air, lalu kepada kepala Desa Kromong yang sigap meminta bantuan saat dirasa warga desa sudah tidak bisa mencari air yang layak, bisa dikatakan responsif dan cekatan untuk melayani warga” (wawancara pada tanggal 21 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor Kecamatan Ngusikan).

Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Anam sebagai Kepala desa

Kromong sebagai berikut:

“Jadi umpan balik yang diberikan masyarakat desa dalam kinerja pemerintah ini banyak mas, terkait dengan program perpipaan ini sebenarnya bagus untuk mengatasi masalah krisis air yang terjadi, namun dalam kenyataan dilapangan ini hanya untuk mempermudah BPBD dalam penyaluran air ke Dusun Banyuasin, jika ditinjau ulang lebih irit jika BPBD memberikan bantuan hippam, sumur bor dan tandon air di Dusun Banyu Asin, kami juga lebih memilih memperbaiki sumur bor yang ada di Desa kami mas daripada menunggu droping air dari BPBD” (wawancara pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 09.40 WIB di Kantor Desa Kromong).

Dapat disimpulkan dari pernyataan kepala Kecamatan Ngusikan dan kepala Desa Kromong bahwasannya *feedback* atau umpan balik dalam mengatasi krisis air yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin memberikan kontribusi untuk perencanaan dan alternatif cara untuk mengatasi krisis air pada daerah terdampak.

Umpan balik dikatakan oleh Bapak Sukadi tentang sinergi mengatasi krisis air di Dusun Banyuasin sebagai berikut:

“jadi umpan balik yang saya berikan kepada pemerintah daerah terkait mengatasi krisis air di sini itu saat terjadi sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang. Umpan balik ini berkaitan dengan strategi yaitu saluran perpipaan” (wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 09.30 WIB di rumah Bapak Sukadi).

Pernyataan tentang umpan balik juga diberikan oleh warga Dusun Banyuasin Bapak Marjono bahwa “selama ini ya ndak pernah ngasih masukan mas ke pemerintah” (wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 10.30 WIB di rumah Bapak Marjono). Perkataan senada juga dikatakan oleh Ibu Marni warga Dusun Banyuasin tentang umpan balik kepada pemerintah daerah bahwa “tidak pernah mas, saya cuma ketemu pas ambil air saat ada kiriman dari BPBD” (wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB di rumah Ibu Marni). Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa umpan balik yang terjadi di Dusun Banyuasin diberikan oleh kepala dusun kepada pemerintah daerah saat terjadi sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sedangkan umpan balik tidak diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah.

Umpan balik pada Dusun Kromong dijelaskan oleh Bapak Wahoni sebagai berikut:

“ya selama ini umpan balik saya berikan saat sosialisasi kepada BPBD mas. Umpan balik ini terkait strategi yang dilakukan oleh pemerintah jombang untuk mengatasi krisis air disini. Strateginya sangat baik mas dulu kami kurang air sampai dikirim air dari jombang, sekarang kami sudah dibuatkan sumur

bor dan diberi tandon air berkapasitas 2200 liter” (wawancara pada tanggal 1 november 2017 pukul 09.00 WIB di rumah Bapak Wahoni).

Pernyataan umpan balik dari Bapak Bambang selaku warga Dusun Kromong menyatakan bahwa “kalau masukan ya biasanya pak Wahoni yang memberi mas, saya ndak pernah ikut sosialisasi soalnya”. (wawancara pada tanggal 1 november 2017 pukul 10.00 WIB di rumah Bapak Bambang). Pernyataan senada juga diberikan oleh ibu Misnah tentang umpan balik kepada pemerintah daerah bahwa “ndak pernah memberi masukan mas, yang saya tau ya dikirimi air sama dibuatkan pak kades sumur bor” (Wawancara pada tanggal 1 november 2017 Pukul 10.30 WIB di rumah Ibu Misnah). Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada umpan balik dari masyarakat yang diberikan kepada pemerintah daerah. Umpan balik diketahui diberikan oleh kepala dusun dan kepala desa kepada pemerintah daerah saat dilakukan komunikasi.

Berdasarkan observasi peneliti pada lapangan feedback atau umpan balik yang terdapat dalam mengatasi krisis air di kecamatan ngusikan tepatnya pada Desa Kromong, Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin sudah ada. Hal tersebut dikarenakan terdapat usulan-usulan dari pemerintah desa dan masyarakat terhadap dinas maupun badan pemerintah daerah untuk membuat sumur bor dan memberikan tandon air.

d. Kreativitas Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Mengatasi Krisis Air Di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

Kreativitas masyarakat dalam mengatasi krisis air yang ada di Kecamatan Ngusikan tepatnya berada di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin Desa Kromong dijelaskan oleh Bapak Anam selaku kepala Desa Kromong yang sebagai berikut:

“Terkait dengan kreativitas masyarakat dalam mengatasi krisis air di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin, Desa Kromong sangat tinggi mas, dapat dicontohkan kreativitas yang dibentuk oleh warga yaitu dengan membantu evaluasi program yang dilakukan oleh BPBD. Tahun 2013 kami diberikan bantuan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman untuk membangun saluran perpipaan. Saluran ini akan menghubungkan Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin, tetapi cara inikurang begitu berdampak mas, jadi kami mengusulkan bagaimana jika kami dibuatkan sumur bor dan tandon air yang akan disebar di titik-titik yang ditentukan, lalu saluran perpipaan yang tadinya untuk menghubungkan Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin di bongkar untuk digunakan untuk saluran Hippam rumah warga dari tandon air yang disebar. Masukan ini kami sampaikan pada BPBD kab. Jombang karena yang sering kesini ya BPBD mas. Lalu kami juga mendapatkan droping air dari BPBD, kami juga mengusulkan bahwasannya kalau seperti ini terus kami masih kekurangan air mas jadi lebih baik kami meminta dibuatkan sumur bor dengan cara ini kami rasa sangat efektif dan efisien karena saat krisis air kami bisa sedot air langsung tanpa menunggu bantuan dari BPBD” (wawancara pata tanggal 22 Juni 2017 pukul 09.30 WIB di Kantor Desa Kromong).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa memberikan kreativitasnya melalui kepala desa untuk membangun dan menyumbang cara kepada BPBD untuk mengatasi krisis air yang terjadi di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin Desa Kromong. Kreativitas tersebut berupa ide-ide yang mengembangkan dan menjadi alternaltif rencana pemerintah daerah untuk mengatasi krisis air.

Kreativitas juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat dapat tahan dalam mengatasi krisis air yang terjadi salah satunya yang diutarakan oleh Bapak Purwanto Plt. BPBD sebagai berikut:

“ya mas jadi kami (BPBD) dalam hal kreativitas untuk dalam mengatasi krisis air di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin, Desa Kromong kami menganalisa masukan-masukan dari masyarakat desa dan merencanakan ulang program yang akan dikerjakan sehingga dapat mengatasi krisis yang terjadi. Kami sekarang sudah independen mas tidak bekerjasama dengan dengan PDAM karena kami telah membuat sumur bor di belakang kantor untuk digunakan saat dibutuhkan. Selain itu kami dengan dinas perumahan dan permukiman masih bekerjasama dalam mengatasi krisis air di Dusun Kromong dan Banyuasin tetapi berjalan sesuai dengan tugas masing-masing. Dalam hal ini kami menyiapkan masyarakat dalam tanggap bencana dan membuat strategi sendiri dengan hippam dan tandon air” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2017, pukul 08.30 WIB di Kantor BPBD Kabupaten Jombang).

Dari pernyataan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BPBD menerima kreativitas dari masyarakat yang akan ditelaah lebih lanjut sehingga perencanaan yang akan dibuat oleh BPBD akan lebih maksimal. Seperti halnya telaah perencanaan yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman yaitu pembangunan saluran perpipaan dari Dusun Kromong ke Dusun Banyuasin. Pernyataan tentang pembangunan saluran perpipaan ini didukung oleh Bapak Syaiful Anwar sebagai berikut:

“Kami membangun sarana perpipaan pada tahun 2013 untuk jangka panjangnya kami harapkan adanya saluran perpipaan ini akan mengatasi krisis yang terjadi dimasa mendatang. Hal ini dievaluasi setelah adanya kreativitas masyarakat dalam sosialisasiantisipasi bencana krisis air yang dilakukan oleh BPBD, ya kami juga menyadari bahwa perencanaan yang kami

berikan tidak akan sesuai untuk selamanya. Kami mendapat kreativitas itu dari BPBD saat rapat dinas terkait strategi mengatasi krisis air” (wawancara pada tanggal 19 Juni 2017, pukul 08.40 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang).

Dari pernyataan wawancara diatas pembangunan saluran perpipaan dilakukan pada tahun 2013 oleh Dinas Perumahan dan Permukiman untuk mengatasi krisis air yang terjadi di Kecamatan Ngusikan tepatnya pada Desa Kromong, Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin. Dengan adanya kreativitas dari masyarakat tersebut dinas dapat mengevaluasi perencanaan yang telah berjalan untuk perencanaan kedepannya. Dalam pernyataan tersebut dinas menyadari bahwa perencanaan yang telah dibuat tidak selamanya akan sesuai dengan keadaan.

Sikap saling percaya yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengatasi krisis air di Kecamatan Ngusikan tersebut dilakukan dengan cara program yang dikerjakan. Sehingga berdasarkan observasi peneliti, dan wawancara pada aktor pemerintah daerah dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa memang dalam mengatasi krisis air di Kecamatan Ngusikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengirimkan air yang dimana dalam pengadaan air Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibantu oleh Perusahaan Daerah Air Minum, sedangkan saluran perpipaan yang telah dibuat oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana dalam program pembuatan saluran perpipaan yang dilakukan

pada tahun 2013 memang telah dilaksanakan hal ini didukung dengan dokumen RAB Dinas Perumahan dan Pemukiman sebagai berikut:

Tabel 4.6 Harga Bahan dan Upah Saluran Perpipaian

HARGA BAHAN DAN UPAH

Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
 Lokasi : Desa Kromong, Kecamatan Ngusikan
 Sumber Dana : APBD 2013

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
I	BAHAN		
1.1	PIPA		
1	Pipa PVC AW Ø 250 mm (10")	M'	333,355.00
2	Pipa PVC AW Ø 150 mm (6")	M'	150,887.00
3	Pipa PVC AW Ø 40 mm (1.5")	M'	14,025.00
4	Reducer Ø 250 mm (10") x Ø 150 mm (6")	Bh	764,530.00
5	Knee Ø 40 mm (1.5")	Bh	5,600.00
6	Lem PVC	Kg	95,700.00
7	Baut 3/8	Bh	15,000.00
8	Baja Konstruksi	Kg	10,600.00
1.2	BATU DAN SEMEN		
1	Grevel Pack 0,5 - 1,5	M3	200,000.00
2	Bentonite	Kg	9,500.00
3	Pasir Cor	M3	158,100.00
4	Semen 50 Kg	Zak	64,900.00
5	Batu Kali Pecah 2/3 (mesin)	M3	195,200.00
6	Solar	Ltr	5,000.00
7	Pelumas	Ltr	46,800.00
8	Kertas pencatat	Rol	45,000.00
9	Alat tulis	Set	30,000.00
10	Batrai dan kabel	Ls	185,000.00
11	Bahan Kimia	Zak	15,000.00
II	DAFTAR UPAH		
1	Geologist/Geophysicist	Oh	150,000.00
2	Site Manager	Oh	100,000.00
3	Administrasi	Oh	40,000.00
4	Logistik	Oh	40,000.00
5	Operator terampil	Oh	65,000.00
6	Mekanik terampil	Oh	60,000.00
7	Kepala Pengeboran	Oh	65,000.00
8	Mandor	Oh	70,000.00
9	Pekerja	Oh	55,000.00
10	Kepala Tukang Batu	Oh	65,000.00
11	Kepala Tukang Las, Pipa	Oh	65,000.00
12	Tukang Batu	Oh	60,000.00
13	Tukang Pipa	Oh	60,000.00
III	SEWA ALAT		
1	Mesin Pompa	Hari	225,000.00
2	Truck Fuso (Roda 10)	trip/hr	450,000.00

3	Mesin Las Listrik 18 PK	Hari	45,000.00
4	Mesin Pompa air 3"	Hari	25,000.00
5	Kompressor Besar	Hari	6,000,000.00
6	Sewa Crane 5 Ton	Jam	125,000.00
7	Mesin Bor	Hari	350,000.00
8	Mata Bor	Ls	125,000.00
9	Vet	Ls	24,000.00
10	Crane Tripot (kaki Tiga) dan Peralatan bantu lain	Hari	75,000.00
11	Air Pencuci	M3	5,000.00
12	Sewa Peralatan Pencuci dan Saringan	Hari	30,000.00
13	Pompa submersible (Q = 5 -10 l/det)	Hari	3,000,000.00
14	Mud pump	Hari	175,000.00
15	Mesin Peralatan Logging	Hari	1,500,000.00
16	Generator Set	Hari	60,000.00
17	Pengambilan sampel Dan Tes Laboratorium	Unit	475,000.00

Sumber : RAB Dinas Perumahan dan Permukiman Kab Jombang 2013

Program lain yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang yaitu memerikan tandon air yang akan di letakkan di titik-titik tertentu pada Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin. Terkait dengan pengadaan air yang dilakukan BPBD dengan Dinas Perumahan dan Permukiman juga membuat sumur bor pada titik tertentu. Sumur bor ini akan menghasilkan air yang dimana akan memberikan persediaan air selama terjadi krisis air. Tetapi persediaan air ini memang kurang walaupun telah terdapat sumur bor yang menjadi persediaan air pada saat krisis.

Kreativitas dalam sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat Dusun Banyuasin dijelaskan oleh Bapak Sukadi sebagai berikut:

“kreativitas ini saya berinisiatif untuk membuat sumur bor swadaya mas, soalnya pemerintah tidak membuat kami sumur bor karena tidak ada sumber air di daerah Banyuasin. Kami juga mengusulkan penggantian dana untuk pengiriman air menjadi pendanaan untuk memperdalam sumur bor yang dibuat secara swadaya” (wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 09.30 WIB di rumah Bapak Sukadi).

Kreativitas masyarakat diketahui setelah wawancara dengan Ibu Marni yang mengatakan bahwa “itu mas dibuatkan sama pak Sukadi sumur bor di tengah hutan mas” (wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB di rumah Ibu Marni). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Marjono warga Dusun Banyuasin bahwa “yang saya tau itu saya ikut membuat sumur bor sama pak Sukadi mas, kalau penggantian dana pengiriman air itu saya ndak tau mas” (wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017, pukul 10.30 WIB di rumah Bapak Marjono).



Gambar 4.17 Pompa Air Dusun Banyuasin

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Berdasarkan wawancara pada Dusun Banyuasin diatas dapat disimpulkan bahwa kreativitas masyarakat ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembuatan sumur bor swadaya yang dikerjakan oleh masyarakat dusun.

Kreativitas masyarakat Dusun Kromong dapat diketahui setelah dilakukan wawancara dengan Bapak Wahoni sebagai berikut:

“ya, mas selama ini kreativitas untuk mengatasi krisis ya tidak ada, la sudah ditangani oleh pemerintah daerah” (wawancara pada tanggal 1 november 2017 pukul 09.00 WIB di rumah Bapak Wahoni).

Penjelasan kreativitas masyarakat juga diungkapkan oleh Bapak Bambang warga Dusun Kromong sebagai berikut:

“ndak ada mas kami ndak membuat apa-apa setelah dibuatkan sumur bor” (wawancara pada tanggal 1 november 2017 pukul 10.00 WIB di rumah Bapak Bambang)

Penjelasan senada tentang kreativitas juga diberikan oleh Ibu Misnah yang mengatakan “tidak mas, sudah ditangani pemerintah kok” (Wawancara pada tanggal 1 november 2017 Pukul 10.30 WIB di rumah Ibu Misnah). Berdasarkan wawancara pada Dusun Kromong tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada kreativitas masyarakat untuk mengatasi krisis air yang terjadi, hal ini dikarenakan permasalahan krisis air di Dusun Kromong sudah teratasi.

Berdasarkan observasi peneliti kreativitas masyarakat dalam mengatasi krisis air di Dusun Banyuasin memberikan sumbangsih dan upaya kepala dusun untuk mengatasi krisis air yang terjadi hal ini dibuktikan oleh pembuatan sumur bor dan tandon air permanen dengan swadaya yang dimana dana yang didapatkan oleh kepala dusun dengan cara meminta sumbangan pada pondok pesantren yang ada di jombang. Tidak hanya itu dusun banyuasin juga memberikan kreativitas berupa

pemikiran penggantian dana untuk pengiriman air menjadi pendanaan untuk memperbaiki sumur bor swadaya mereka.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Sinergi Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Mengatasi Krisis Air Di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang

a. Faktor Pendukung

Desa Kromong merupakan desa yang berada di sebelah paling utara Kabupaten Jombang yang selalu mengalami krisis air ketika musim kemarau tiba. Dalam mengatasi krisis air di Desa Kromong yang tepatnya berada di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung merupakan faktor yang menyebabkan kegiatan yang berdampak positif. Dalam sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengatasi krisis air di Kecamatan Ngusikan tepatnya pada Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin, Desa Kromong dapat berjalan dengan baik karena adanya faktor pendukung. Adapun faktor pendukung dalam mengatasi krisis air di Kecamatan Ngusikan Desa Kromong, Dusun Kromong dan Banyuasin sebagai berikut:

1) Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat Desa Kromong dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu program atau kegiatan yang dijalankan. Peran aktif masyarakat akan membuat suatu program ataupun kegiatan dapat berjalan dengan baik. Seperti halnya dalam

mengatasi krisis air di kecamatan Ngusikan Desa Kromong bahwa keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung dalam upaya tersebut. Terkait hal tersebut Bapak Purwanto menjelaskan:

“Masyarakat menjadi faktor pendukung. Beberapa masyarakat sudah menyadari akan pentingnya kontribusi mereka terhadap program atau kegiatan yang dijalankan untuk mengatasi krisis air yang terjadi di desa mereka” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2017, pukul 08.30 WIB di Kantor BPBD Kabupaten Jombang).

Berdasarkan wawancara diatas kesadaran masyarakat dalam kontribusi untuk mengatasi krisis air di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin, Desa Kromong Kecamatan Ngusikan, menjadi faktor yang mendukung untuk program atau kegiatan pemerintah. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam mengatasi krisis air di kecamatan Ngusikan di utarakan oleh Bapak Anam selaku kepala desa Kromong bahwa:

“Faktor pendukung yang diberikan masyarakat dalam mengatasi krisis air disini, masyarakat ikut terlibat dalam pembuatan saluran perpipaan, pemasangan tandon, serta giat ikut musyawarah atau rapat desa untuk masukan kepada BPBD, serta pamong di dusun banyuasin juga memberikan trobosan besar” (wawancara pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 09.30 WIB di Kantor Desa Kromong).



Gambar 4.18 Tandon Air Permanen Swadaya

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2017)



Gambar 4.19 Rapat Pemaksimalan Sumur Bor Swadaya

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2017)



Gambar 4.20 Sumber Mata Air Dusun Banyuasin

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2017)

Pernyataan diatas menjelaskan keterlibatan masyarakat Desa Kromong dalam mengatasi krisis air di desanya dengan keterlibatannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Jombang. Selain itu pemerintahan desa yang mewakili masyarakat juga rutin mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jombang.

2) Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan salah satu aktor besar yang ikut berperan dalam mengatasi krisis air di kecamatan Ngusikan, Desa Kromong, Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin. Pemerintah

daerah berkontribusi cukup besar dalam kegiatan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Purwanto bahwa:

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah aktor dari pemerintah daerah untuk mengatasi krisis air terutama BPBD menjadi faktor pendukung utama dalam hal ini. Kami akan melakukan kegiatan dimana kegiatan ini akan mencari dan memperbaiki solusi yang telah kami laksanakan. jadi selama ini saya rasa faktor pendukung yang sangat tinggi telah diberikan oleh masyarakat dalam bentuk sumbangsih pemikiran akan cara untuk mengatasi krisis air melalui sosialisasi yang dilakukan oleh kami” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 08.30 WIB di Kantor BPBD Kabupaten Jombang).

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan aktor pemerintah daerah dalam mengatasi krisis air di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin Desa Kromong Kecamatan Ngusikan. Dalam mengatasi krisis air yang terjadi. Dari pernyataan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yang di terima dari Badan Penanggulangan Bencana daerah adalah keikutserataan masyarakat yang selama ini memberikan bantuan masukan terkait cara untuk mengatasi krisis air yang terjadi di Desa Kromong, Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin, Kecamatan Ngusikan pada saat sosialisasi diselenggarakan.

Pernyataan faktor pendukung dan penghambat diutarakan oleh Bapak Syaiful Anwar dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang:

“Faktor pendukung dalam mengatasi krisis air di Kecamatan Ngusikan ini adalah peran dari Badan Penanggulangan Bencana yang mendukung program yang kami lakukan dengan memberikan masukan saat rapat koordinasi dalam mengatasi krisis air di Kabupaten Jombang. Begitu pula faktor pendukung yang diberikan oleh masyarakat yaitu dalam pembuatan saluran perpipaan masyarakat juga antusias untuk membantu pembangunan tersebut” (wawancara pada tanggal 19 Juni pukul 08.40 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa faktor pendukung yang diterima oleh Dinas Perumahan dan Permukiman berupa peran yang sangat baik dari Badan Penanggulangan Bencana yang selalu mendukung dan memberi masukan dalam program yang dikerjakan oleh dinas dan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan saluran perpipaan yang di selenggarakan oleh dinas perumahan dan permukiman.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan faktor yang menjadi penghalang dari setiap kegiatan dan berdampak kearah yang lebih negatif. Dalam sinergi pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengatasi krisis air di Dusun Kromong dan Banyuasin Desa Kromong Kecamatan Ngusikan juga masih memiliki hambatan. Hambatan tersebut adalah kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat menjadi faktor yang mendukung dalam menjalankan suatu kegiatan. Namun kesadaran masyarakat dalam menjaga bantuan yang diberikan oleh dinas perumahan dan

permukiman serta bantuan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana masih kurang dijaga sepertihalnya saat survei pada Dusun Banyuasin bahwa tandon air dan saluran perpipaan dari Desa Kromong ke Dusun Banyuasin sudah rusak karena terbakar oleh warga saat musim kemarau untuk pembukaan lahan. Hal ini diperkuat oleh bapak Anam yang mengatakan:

“banyak saluran perpipaan terbakar saat warga membakar sampah untuk membuka lahan pertanian dan tandon air yang kurang dirawat, lalu tandon permanen yang dibuatkan oleh dinas perumahan dan permukiman juga sudah rusak semua” (wawancara pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 09.50 WIB di Kantor Desa Kromong).



Gambar 4.21 Tandon Air Permanen (DISPERKIM)

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2017)



Gambar 4.22 Kondisi Saluran Perpipaian (DISPERKIM)

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2017)

Faktor penghambat dalam sinergi mengatasi krisis air di kecamatan Ngusikan tepatnya di Desa Kromong Dusun Kromong dan Banyuasin diutarakan oleh Bapak Syaiful Anwar sebagai berikut:

“Faktor penghambat yang kami rasakan yaitu pendanaan yang terbatas oleh anggaran, hal ini tidak bisa kami anggarkan secara continue karena sifat bangunan yang kami bangun itu permanen ada danapun untuk biaya pemeliharaan saja” (wawancara pada tanggal 19 Juni pukul 08.40 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang diterima oleh Dinas Perumahan dan Permukiman berupa kendala pada pendanaan. Sedangkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diwakili oleh Kepala Plt Bapak Purwanto memaparkan bahwa:

“Faktor penghambat untuk mengatasi krisis air di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin kalau dari kami bukan masalah pendanaan, karena dalam pengentasan bencana dana yang kami

terima tidak terbatas mas, penghambat kami terdapat pada peran yang dimana kami hanya berperan untuk menanggulangi saja yang berarti tidak bisa menjadikan pembangunan yang permanen, karena penanggulangan permanen hanya bisa dibuatkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman” (wawancara pada tanggal 25 Mei 2017 pukul 08.30 WIB di Kantor BPBD Kabupaten Jombang).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dialami oleh masing-masing instansi pemerintah tidak sama karena terdapat peran yang berbeda. Faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Perumahan dan Permukiman berupa dana atau anggaran, sedangkan faktor penghambat yang dialami oleh BPBD merupakan fungsi peran yang tidak bisa maksimal.

Berdasarkan hasil observasi peneliti faktor pendukung serta penghambat yang ada didalam sinergi dalam mengatasi krisis air tersebut, terdapat beberapa masalah yang dimana peran dari penyampaian informasi oleh perangkat desa yang kurang tanggap karena pengiriman kabar yang telat. Sedangkan dalam pendukung adanya kreativitas masyarakat yang dimana ditandai antusiasme masyarakat dalam mencari alternatif penyelesaian dalam mengatasi krisis air yang dibuktikan dengan terbangunnya sumur bor dan tandon air secara swadaya di Dusun Banyuasin.

Faktor penghambat lain berupa letak Dusun Banyuasin yang terpencil hal ini dapat dibuktikan dengan map dengan aplikasi google sebagai berikut:



Gambar 4.23 jalan menuju Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin

Sumber: Dokumentasi Peneliti (2017)

C. Pembahasan

1. Sinergi Antara Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Mengatasi Krisis Air Di Kecamatan Ngusikan

Pemenuhan kebutuhan air merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk kesejahteraan rakyat, dalam permasalahan krisis air terdapat hubungan (sinergi) pemerintah daerah yang dibangun baik antar instansi pemerintah maupun dengan masyarakat terdampak. Aktor yang terlibat dalam mengatasi krisis air yang terjadi di Kecamatan Ngusikan, kabupaten Jombang yang tepatnya pada Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin antara lain Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang dan Masyarakat terdampak. Analisa tersebut menimbang pendapat penerapan konsep stakeholder (aktor) yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik atau interaksi antar aktor yang dimana pengelompokan aktor dalam

unsur-unsur pemerintahan dibagi menjadi tiga kategori yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat (Serdamayanti, 2004). Dalam sinergi yang dibangun oleh aktor-aktor tersebut bertujuan untuk mendapatkan keluaran yang lebih baik untuk mengatasi krisis air yang terjadi. Maka perlu adanya tolak ukur untuk mengetahui parameter sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

a. Parameter Sinergi

Parameter sinergi menurut Doctoroff (dalam Yanti, 2016) terdapat empat syarat agar sinergi dapat terwujud. Empat syarat tersebut yaitu kepercayaan, komunikasi yang efektif, umpan balik (feedback), dan kreativitas. Maka pembahasan dalam skripsi ini menggunakan analisa dengan menimbang pendapat dari Doctoroff dan pendapat ahli lain yang menunjang pendapat dari teori parameter sinergi.

1) Sikap Saling Percaya (*Trust*)

Dalam parameter sinergi menurut Doctoroff terdapat aspek kepercayaan. Kepercayaan sendiri menurut Moorman (1993) adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan pada seseorang tersebut. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Dalam sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengatasi krisis air di Kecamatan

Ngusikan, terdapat dua kategori yaitu kepercayaan antara instansi pemerintah dan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Kepercayaan antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi krisis air di kecamatan ngusikan didapatkan dari adanya perencanaan strategi yang dilakukan secara bersama untuk menghasilkan keluaran yang lebih baik. Pendapat ini sejalan dengan teori kolaborasi yang dikemukakan oleh Abdulsyani (1994), kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan prinsip saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing pihak. Dalam kaitan aktivitas masing-masing pihak maka dapat diketahui terdapat perbedaan tugas antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, perbedaan ini terletak pada tugas Dinas Perumahan dan Permukiman yang membuat strategi penanggulangan secara permanen, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melengkapi strategi Dinas Perumahan dan Permukiman dengan sifat tidak permanen.

Dalam strategi untuk mengatasi krisis air di Kecamatan Ngusikan, badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan kemitraan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten

Jombang. Kemitraan yang terjalin dalam bentuk penyediaan air oleh PDAM untuk membantu BPBD. Kemitraan antara BPBD dengan PDAM tersebut tidak berjalan lama dikarenakan terdapat strategi baru yang dilakukan oleh BPBD yaitu membangun sumur bor di belakang kantor BPBD untuk membantu penyediaan air. Menimbang pendapat dari Tennyson (dalam Semesta, 2014), kemitraan adalah kesepakatan antara individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama. Penyediaan air yang dikirim oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dibantu oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang. Maka dapat difahami pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Jombang, dengan adanya kerjasama dalam penyediaan air yang dilakukan oleh perusahaan daerah tersebut pemerintah daerah (BPBD) membeli air yang disediakan oleh PDAM. Kepercayaan antara BPBD dengan PDAM terbangun karena pelunasan air dengan tepat. Analisa tersebut berdasarkan pendapat dari Mc Knight, Kacmar, dan Choudry dalam Bachmann & Zaheer (2006) menyatakan kepercayaan dibangun pihak-pihak (aktor) tertentu saling mengenal satu sama lain melalui interaksi dan transaksi.

Maka dapat diketahui bahwa terdapatnya pemutusan kerjasama antara BPBD dengan PDAM tersebut dikarenakan adanya strategi dari BPBD dalam penyediaan air yang menekan biaya pengeluaran pengadaan air untuk mengatasi krisis air.

Dusun Kromong merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Kromong yang mengalami krisis air. Dalam mengatasi krisis air pemerintah daerah membuat strategi untuk mengatasi krisis di Dusun Kromong yaitu dengan pengiriman air saat terjadi krisis, pemberian tandon air berkapasitas 2.200 liter dan pembuatan sumur bor. Adanya strategi tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat Dusun Kromong terhadap pemerintah daerah ditumbuhkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dengan bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang.

Krisis air di Dusun Kromong sendiri saat ini telah teratasi karena adanya kerjasama Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jombang dalam pembuatan strategi sumur bor dan tandon air berkapasitas 2.200 liter. Pembuatan sumur bor sendiri merupakan strategi dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dengan kedalaman lebih dari 100 meter dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu menunjang strategi Dinas Perumahan dan Permukiman dengan memberikan tandon air

berkapasitas 2.200 liter. Penjelasan lebih lanjut dengan menimbang pendapat dari Dwiyanto (2011) yang berisikan kepercayaan social adalah keadaan yang menggambarkan kepercayaan warga terhadap warga yang lainnya dalam suatu komunitas atau masyarakat. Kepercayaan terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepercayaan social, karena kepercayaan publik tidak terjadi dalam ruang kosong melainkan dalam sebuah komunitas yang di dalamnya terdapat dinamika yang mau tidak mau akan mempengaruhi kepercayaan publik kepada pemerintah dan kebijakannya, maka dengan mempertimbangkan pendapat tersebut diketahui bahwa kepercayaan publik didapatkan dari kebijakan pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan. Sepertihalnya permasalahan krisis air di Dusun Kromong menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yaitu pembuatan sumur bor dan pemberian tandon air bisa mengatasi krisis air yang terjadi, dengan adanya kebijakan tersebut menumbuhkan rasa kepercayaan kepada pemerintah daerah.

Berbeda dengan krisis air yang berada di Dusun Banyuasin sampai saat ini tahun 2017 Dusun Banyuasin masih mengalami permasalahan krisis air. Dalam mengatasi krisis air di Dusun Banyuasin pemerintah telah berupaya membangun kepercayaan bahwa pemerintah bisa mengatasi krisis air pada dusun tersebut. Pemerinah daerah melalui Dinas Perumahan dan Permukiman

dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang membangun kepercayaan dengan masyarakat Dusun Banyuasin melalui strategi yang digunakan untuk mengatasi krisis air yaitu dengan cara membangun saluran perpipaan, pemberian tandon air berkapasitas 2.200 liter dan pengiriman bantuan air jika dimintai oleh Dusun Banyuasin. Adanya strategi tersebut diharapkan mampu mengatasi krisis air dan bisa membangun kepercayaan masyarakat Dusun Banyuasin dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, strategi saluran perpipaan yang digunakan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah daerah terutama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman tidak membuahkan hasil. Masyarakat Dusun Banyuasin masih mengalami krisis air hingga saat ini, hal ini menimbulkan rasa tidak percaya bahwa pemerintah daerah bisa mengatasi krisis air di Dusun Banyuasin. Permasalahan strategi dalam mengatasi krisis air di Dusun Banyuasin merupakan hal yang seharusnya ditindak lanjuti dan dikaji ulang untuk penyesuaian langkah kedepannya. Permasalahan ini timbul karena letak sumber air (sumur bor) berada di Dusun Kromong yang akan dialirkan melalui jaringan perpipaan menuju ke Dusun Banyuasin. Jika ditinjau dari keadaan setelah observasi letak Dusun Banyuasin

sejauh 7 km dari Dusun Kromong dan melewati kawasan hutan kapur yang bertekstur bukit. Dengan keadaan demikian maka pengaliran air sulit bahkan tidak sampai ke Dusun Banyuasin, ditambah lagi dengan letak tandon air yang dibangun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman terletak rata dengan tanah, dengan kondisi pembangunan tersebut akan membuat aliran air tidak bertekanan penuh. Dari ketidak sesuaian strategi saluran perpipaan tersebut membuat masyarakat Dusun Banyuasin tidak memiliki kepercayaan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dalam mengatasi krisis air yang terjadi di Dusun Banyuasin.

Dalam sinergi mengatasi krisis air di Dusun Banyuasin sikap percaya masyarakat kepada pemerintah daerah dibangun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dengan memberikan bantuan air dan pemberian tandon air berkapasitas 2.200 liter. Strategi ini mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam mengatasi krisis air di Dusun Banyuasin. Pengiriman air dilakukan oleh pemerintah daerah melalui badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang atas permintaan Dusun Banyuasin. Jumlah pengiriman air ini sebesar 25.000 liter air yang dikirim dua kali dalam satu minggu.

Kepercayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang dengan masyarakat dalam penelitian yang dilakukan di PDAM menunjukkan rasa kurang percaya, karena dalam mengatasi krisis air di Dusun Banyuasin dan Dusun Kromong, pihak Perusahaan Daerah Air Minum masih kurang yakin untuk membangun sarana dan prasarana. Ketakutan Perusahaan Daerah Air Minum ini dikarenakan jika membangun fasilitas apakah masyarakat mau menggunakan air dan membayar tagihan air kepada PDAM. Oleh sebab itu pihak PDAM sampai saat ini belum membangun fasilitas di Dusun Banyuasin. Maka dengan demikian dapat ditarik hasil bahwa PDAM Kabupaten Jombang tidak berusaha dan membangun sikap saling percaya dengan masyarakat. Analisa tersebut menimbang pendapat dari Doney dan Canon (1997), penciptaan awal hubungan kemitraan dengan pelanggan didasarkan atas kepercayaan.

2) Komunikasi yang efektif

Parameter kedua dalam sinergi menurut Doktorof adalah komunikasi. Komunikasi menurut Laswell dalam karyanya *Strukture and Funcion of Comunication in Society* (dalam Efendi, 2000), menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah. Laswell juga mengatakan terdapat lima unsur komunikasi yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Komunikasi yang dibangun kedua aktor pemerintah daerah dalam mengatasi krisis air di Kecamatan Ngusikan. Komunikasi dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tujuan mengatasi krisis air dilakukan dengan cara bertelepon dan melakukan rapat formal dalam mengatasi krisis air yang terjadi di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin.

Komunikasi yang dibangun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dalam mempererat dan mempertahankan rasa saling percaya di Dusun Kromong tidak menunjukkan adanya tindak lanjut dari kepercayaan yang telah dibuat melalui strategi sumur bor. Dikatakan tidak ada komunikasi karena setelah pembuatan sumur bor Dinas Perumahan dan Permukiman tidak melakukan evaluasi untuk strategi kepedannya karena permasalahan krisis air di Dusun Kromong disebabkan telah teratasinya krisis air pada Dusun Kromog.

Komunikasi Dinas Perumahan dan Permukiman di Dusun Banyuasin setelah dilakukan penelitian dan analisa oleh peneliti komunikator dari Dinas Perumahan dan Permukiman tidak ada. Dikatakan tidak ada karena dalam pembuatan saluran perpipaan Dinas Perumahan dan Permukiman merasa telah selesai tugasnya

untuk mengatasi krisis air yang terjadi dan melimpahkan urusan krisis ini kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang karena dikategorikan sebagai bencana. Maka dalam penelitian ini ditemukan masalah dimana permasalahan tersebut bersumber dari komunikasi Dinas Perumahan dan Permukiman yang tidak memiliki komunikator dengan komunikan (masyarakat Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin).

Komunikator pemerintah daerah yang kedua dalam mengatais krisis air yang terjadi di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang. Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan masyarakat terjalin dengan baik menggunakan media bertelepon, sosialisasi dan surat menyurat. Analisa peneliti tersebut dengan menimbang pendapat Wursanto (2009), media yang dipergunakan dalam komunikasi antara lain memo/nota dalam, buku pedoman (buku pedoman oraganisasi, buku pedoman tatakerja, buku pedoman peraturan, buku pedoman kebijaksanaan, buku pedoman riwayat organisasi, buku pedoman lengkap), perintah, teguran dan pujian.

Dalam hal pengiriman air yang diajukan Dusun Banyuasin setiap tahunnya proses untuk mendapatkan bantuan air cukup panjang dimana pengajuan ini membutuhkan peran dari Kepala Desa Kromong, Kepala Kecamatan Ngusikan baru bisa kepada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dengan komunikasi seperti itu maka dapat diketahui bahwa media komunikasi surat menyurat ini dilakukan dengan formal. Komunikasi ini merupakan jenis komunikasi primer. Hal ini di analisa dengan menimbang pendapat dari Effendy (2000), yang menyatakan komunikasi primer terjadi dalam konteks komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Proses komunikasi interpersonal berjalan melalui tahap-tahap komunikasi yang didukung oleh berbagai unsur komunikasi atau elemen-elemen komunikasi atau komponen-komponen komunikasi seperti pengirim pesan-pesan, encoding, saluran/media komunikasi, decoding, penerima pesan, umpan balik, dan konteks. Analisa lain digunakan oleh peneliti dengan menimbang pendapat dari Gibson *et al.* (2012) yang mengatakan komunikasi ke atas adalah komunikasi yang mengalir dari tingkat lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Oleh karenanya peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam proses permintaan air sejalan dengan pendapat Gibson dimana permintaan ini dari masyarakat yang meminta bantuan kepada kepala dusun yang diteruskan sampai pada pemerintah daerah dengan menggunakan surat permohonan bantuan air.

Fungsi utama komunikasi menurut Handoko (2013), untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkata bawah. Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana juga terbangun secara langsung (tatap muka) dengan masyarakat saat sosialisasi dan saat pengiriman air. Media komunikasi telepon juga digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana saat masyarakat meminta pengiriman air di Dusun Banyuasin. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari Burgon dan Huffner, (2002) yang menyatakan Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik, baik secara langsung (face to face) maupun dengan media. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang juga melakukan komunikasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang dengan cara bertatap muka secara langsung dan bertelepon. Komunikasi yang dibangun ini dengan tujuan untuk melakukan kerjasama yaitu membantu penyediaan air yang dibutuhkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam penyediaan air profesionalitas kinerja yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jombang untuk membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus membeli air tersebut.

Pembahasan diatas menunjukkan interaksi dalam sinergi mengatasi krisis air yang terjadi di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin. Terdapatnya komunikasi yang tidak efektif dari Dinas Perumahan dan Permukiman terhadap masyarakat dalam mengatasi krisis air ini dapat menimbulkan kurangnya sinergi antara kedua aktor tersebut dan membahayakan kepercayaan yang telah terjalin antara instansi pemerintah lain dengan masyarakat serta berdampak pada umpan balik dari strategi yang dilakukan.

3) Umpan Balik

Menurut Lutan (1988) umpan balik adalah pengetahuan yang diperoleh berkenaan dengan suatu tugas, perbuatan atau respon yang telah diberikan. Pendapat ini diperjelas oleh Wilbur Scarman yang dikutip oleh Efendi dalam buku “Dimensi-Dimensi Komunikasi” menyatakan bahwa, Komunikasi akan berhasil jika pesan yang disampaikan cocok dengan *frame of refrence* yaitu pengalaman dan pengertian yang diperoleh komunikan. Maka umpan balik setelah dilakukan analisa oleh peneliti, umpan balik sinergi dalam mengatasi krisis air yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah daerah dengan masyarakat terbagi menjadi dua yaitu umpan balik antara instansi pemerintah (Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dengan masyarakat. Sumber umpan balik

menurut Rachmiate, (2002) terdiri dari tiga sumber yaitu lembaga pemerintah, masyarakat dan media masa.

Umpan balik ini terjadi akibat adanya komunikasi Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang yang terjadi ketika terdapatnya interaksi dimana interaksi tersebut melalui rapat triwulan dan bertelefon. Umpan balik antara kedua instansi pemerintah tersebut berupa pembahasan evaluasi strategi yang dilakukan. Umpan balik antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk dalam kategori *internal feedback* karena masing-masing aktor pemerintah daerah menyadari bahwa terdapat kekurangan pada strategi yang telah dibuat.

Umpan balik masyarakat Dusun Banyuasin dalam mengatasi krisis air ini diperoleh berupa reaksi dalam program pembuatan saluran perpipaan pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang berbentuk kritik, saran dan evaluasi dalam strategi yang lalu maupun untuk strategi kedepannya. Pembahasan ini sejalan dengan pendapat A. Judge dan Robins (2008), individu akan bekerja secara lebih baik ketika mereka mendapat umpan balik mengenai seberapa baik kemajuan mereka, karena umpan balik membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian apa yang telah dan apa yang ingin dilakukan.

Permasalahan timbul ketika masyarakat tidak mengetahui kepada siapa umpan balik ini diberikan. Selama ini masyarakat memberikan umpan balik strategi perpipaan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang kesalahan umpan balik tersebut dikarenakan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman tidak berjalan efektif dengan masyarakat. Terjadinya *eksternal feedback* ini karena dalam umpan balik yang diterima dalam strategi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman ini bersumber dari masyarakat yang menyampaikan umpan balik kepada Dinas Perumahan dan Permukiman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah saat dilakukan sosialisasi penanggulangan bencana. Maka dalam umpan balik tersebut dapat dikatehui sebagai umpan balik tertunda, yang selaras dengan pendapat Efendi (2000) yang mengatakan, "Umpan balik tertunda (*delayed feedback*) terjadi dalam berbagai jenis situasi komunikasi, tetapi lebih sering terjadi pada komunikasi massa. Dilain segi umpan balik tertunda dalam komunikasi massa bersifat selektif, dan komunikator hanya memperoleh wawasan mengenai bagaimana sebagian kecil dari komunikannya merasakan tentang pesan yang disampaikan.

Dalam kenyataannya ketepatan pemilihan starategi perpipaan yang dibuat oleh Dinas Perumahan dan Permukiman tidak sesuai untuk mengatasi krisis air yang terjadi di Dusun Banyuasin. Tidak

tepatnya strategi ini karena menimbang lokasi sumur bor yang terletak di Dusun Kromong yang dialirkan menuju Dusun Banyuasin dengan medan yang berbukit akan membutuhkan beribu-ribu meter kubik air yang akan tergenang di pipa-pipa sebelum sampai ke Dusun Banyuasin. Maka dalam analisa diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat umpan balik dalam sinergi pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengatasi krisis air meskipun dalam keadaan yang tertunda karena tingkat komunikasi yang tidak efektif.

4) Kreativitas

Kreativitas dalam parameter sinergi merupakan indikator terakhir yang merupakan hasil dari adanya umpan balik. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti dengan menimbang pendapat dari Munandar (1995) kreativitas adalah suatu kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan yang baru yang dapat memecahkan permasalahan, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur yang sudah ada sebelumnya.

Kreativitas dalam sinergi mengatasi krisis air terbangun dari usulan masyarakat dimana masyarakat berperan aktif dalam pembuatan strategi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu dalam hal pengiriman air. Masyarakat

menyadari bahwa jika mereka hanya meminta air mereka tidak bisa mandiri, oleh sebab itu masyarakat memilih untuk mengalihkan alokasi dana untuk pengiriman air ini menjadi alokasi pembuatan sumur bor baru pada Dusun Banyuasin yang sampai saat ini belum teratasinya krisis air. Masyarakat juga mengambil inisiatif untuk membuat sumur bor dengan dana swadaya.

Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman belum melakukan inovasi dalam mengatasi krisis air yang terjadi di Dusun Banyuasin. Meninjau dari strategi yang dibuatkan untuk mengatasi krisis air di Dusun Banyuasin yaitu saluran perpipaan yang dibuatkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman belum bisa mengatasi krisis air yang terjadi. Fenomena ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dimana masyarakat Dusun Banyuasin akan menilai kinerja aparatur desa tidak melaksanakan keadilan sosial. Jika Dinas Perumahan dan Permukiman tidak segera mengatasi dan membuat strategi baru untuk mengatasi krisis air yang terjadi di Dusun Banyuasin akan menjadi sebuah permasalahan yang besar dan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Kreativitas masyarakat dalam hal sinergi dalam mengatasi krisis air di Dusun Banyuasin menimbang pendapat dari NACCCE (National Advisory Committee on Creative and Cultural Education) (dalam Craft, 2005), kreativitas adalah aktivitas

imaginatif yang menghasilkan hasil yang baru dan bernilai. Maka dalam kaitan kreativitas masyarakat sangat tinggi dimana dalam strategi perpipaan yang dianggap oleh masyarakat tidak akan berjalan lancar untuk mengatasi krisis air yang ada di Dusun Banyuasin, Kepala Dusun Banyuasin memberikan inisiatif tanpa sepengetahuan pemerintah daerah mencari donatur untuk pembuatan sumur bor yang letaknya tidak jauh. Dalam pembuatan sumur bor oleh kepala Dusun Banyuasin jika ditinjau dari segi administratif kawasan sumur bor yang dibuat memasuki wilayah dari Kabupaten Lamongan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan pada jangka kedepannya. Maka perlu adanya campur tangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan antar Kabupaten untuk membuat kerjasama sehingga tidak merugikan kabupaten yang bersangkutan.

Kreativitas juga ditunjukkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan rencana pembuatan sumur bor untuk mengganti penyediaan air yang dibantu oleh perusahaan daerah hal ini ditujukan untuk menghemat dana anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga membuat kreativitas lain berupa sumur bor yang ada di belakang kantor. Pembuatan sumur bor ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air ketika dibutuhkan dan strategi ini sangat menunjang untuk menekan pengeluaran biaya untuk pengadaan air.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Sinergi Antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Mengatasi Krisis Air di Kecamatan Ngusikan

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang menyebabkan kegiatan berdampak lebih positif. Dalam sinergi antar aktor untuk mengatasi krisis air di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin memiliki faktor pendukung untuk mengatasi krisis air yang terjadi dengan lebih baik. Adapun faktor pendukung dalam mengatasi krisis air tersebut antara lain:

1) Keterlibatan Masyarakat

Faktor pendukung terjalannya sinergi antar aktor dalam mengatasi krisis air di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin adalah peran aktif masyarakat hal ini sejalan dengan pendapat Slamet (dalam Suryono, 2001) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Peran aktif masyarakat terbukti dengan adanya kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam mengatasi krisis air yang terjadi di Dusunnya. Dengan adanya peran aktif masyarakat ini akan memberikan efek dimana efek tersebut akan mempengaruhi kinerja

dari pemerintah dalam pembuatan strategi untuk mengatasi krisis air yang terjadi di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin.

Peran aktif masyarakat tersebut dengan cara memberikan saran untuk evaluasi saat adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peran aktif masyarakat juga dapat ditunjukkan dengan pembuatan sumur bor di Dusun Banyuasin dengan cara swadaya. Masyarakat dalam hal ini juga menjadi faktor pendukung, dukungan ini diberikan masyarakat berupa ikut menjadi inisiator yang membuat langkah sendiri dengan pembuatan sumur bor dengan swadaya. Analisa peneliti diatas menimbang pendapat dari Said dan Yudo (2005) yang menyatakan seluruh masyarakat harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan air minum. Keterlibatan tersebut dapat melalui perwakilan yang demokratis serta mencerminkan dan mempresentasikan keinginan dan kebutuhan mayoritas masyarakat.

2) Dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dukungan pemerintah menurut Said dan Yudo (2015) salah satunya adalah pelayanan yang optimal dan tepat sasaran. Dalam kaitan faktor pendukung yang diberikan oleh pemerintah daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang memberikan dorongan terhadap antusias masyarakat untuk evaluasi strategi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah yaitu mengganti pengiriman air menjadi dana untuk membuat sumur bor yang baru. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga membuat sumur bor sendiri maka hal ini merupakan faktor pendukung dari pemerintah daerah untuk mengatasi krisis air secara efektif dan efisien dalam penyediaan air.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang menyebabkan kegiatan berdampak negatif yang mengganggu atau menghalangi suatu program, kegiatan atau kerjasama sehingga tidak terlaksana dengan baik. Dalam sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengatasi krisis air di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin memiliki faktor penghambat dalam mengatasi krisis air yang terjadi antara lain:

1) Letak Dusun Banyuasin

Hoover dan Giarratan (1999), lokasi atau letak diartikan sebagai ilmu tentang alokasi secara geografis dari sumber daya yang langka, serta hubungannya atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain (*activity*). Secara umum, pemilihan lokasi oleh suatu unit aktivitas ditentukan oleh beberapa faktor seperti: bahan baku lokal (*local input*); permintaan lokal (*local demand*); bahan baku yang dapat dipindahkan (*transferred input*); dan permintaan luar (*outside demand*). Ditinjau dari letak Dusun Banyuasin yang berjarak 7 km dari pusat desa dengan jalan

rusak dan ekstrim yang melewati kawasan perbukitan merupakan faktor penghambat untuk pengiriman air saat krisis air terjadi. Analisa peneliti dengan menimbang pendapat diatas menemukan masalah kembali pada penyediaan bahan baku, karena di Dusun Banyuasin tidak terdapat sumber mata air sehingga pemerintah daerah tidak bisa memberikan bantuan sumur bor.

2) Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Faktor penghambat terjalinya sinergi antar aktor dalam mengatasi krisis air di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin, Desa Kromong, Kecamatan Ngusikan adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah. Masyarakat masih kurang menjaga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan terbakarnya saluran perpipaan saat warga membuka lahan baru. Hal ini akan menimbulkan rasa tidak percaya dari pemerintah daerah sebab pemerintah berfikir kami sudah membangun sebuah solusi dan memberikan bantuan tetapi tidak dijaga dan dipergunakan secara baik.

3) Kurangnya Sosialisasi

Faktor penghambat dari pemerinah daerah yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Permukiman antara lain tidak ada evaluasi strategi perpipaan yang dibangun sehingga tidak ada perbaikan strategi dan komunikasi Dinas Perumahan dan Permukiman dengan masyarakat yang rendah menyebabkan

timbulnya rasa curiga masyarakat kepada pemerintah daerah karena tidak ada tindak lanjut dalam mengatasi krisis air yang terjadi di Dusun Kromong. Analisa tersebut menimbang pendapat dari Sedarmayanti (2004) yang mengatakan pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

4) Komunikasi yang Tidak Efektif

Komunikasi yang tidak efektif merupakan faktor penghambat dalam sinergi mengatasi krisis air yang terjadi di Dusun Kromong dan Dusun Banyuasin. Dapat diketahui bahwa komunikasi antara Dinas Perumahan dan Permukiman dengan masyarakat tidak berjalan lancar yang menimbulkan efek yang begitu besar pada umpan balik yang diberikan oleh masyarakat dan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah menurun. Analisa peneliti diatas menimbang pendapat dari Stuart (dalam Cangara, 2008), semua pengaruh komunikasi yang dilakukan secara terencana mempunyai tujuan, yakni memengaruhi khalayak atau penerima. Pengaruh atau efek ialah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan.

5) Kurangnya Dukungan Dinas Perumahan dan Permukiman

Analisa kurangnya dukungan Dinas Perumahan dan Permukiman dengan menimbang pendapat dari Domain (2010) yang mengatakan bahwa kerja sama antar pemerintah adalah tata cara yang digunakan antara satu atau lebih pemerintah dalam mencapai tujuan bersama, pemerintah jasa atau pemecahan masalah, maka peranan Dinas Perumahan dan permukiman mengenai sumur bor ilegal sangat tidak mendukung dalam sinergi mengatasi krisis air yang terjadi di Dusun Banyuasin. Jika pemerintah mendukung maka pemerintah daerah akan membuatkan dan menembuskan program antar kabupaten sehingga dalam masa mendatang keberadaan sumur bor ini tidak akan menjadi masalah baru.